

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 16 TAHUN 2007

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

DAERAH

TAHUN 2005 – 2025



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DAFTAR ISI

BAB I .	PENDAHULUAN	1
A.	Pengantar	1
B.	Pengertian	2
C.	Maksud dan Tujuan	2
D.	Landasan Penyusunan RPJP Kabupaten Kulon Progo	2
E.	Tata Urut	3
BAB II .	KONDISI UMUM	5
A.	Kondisi Saat Ini	5
B.	Tantangan	33

C.	Modal Dasar	42
BAB III .	VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005-2025....	43
BAB IV .	ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG TAHUN 2005-2025	48
A.	Arah Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025	51
1.	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab	51
2.	Mewujudkan masyarakat yang berdaya-saing	52
3.	Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum	62
4.	Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu	65
5.	Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan	66
6.	Mewujudkan Kulon Progo yang asri dan lestari	70
7.	Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri	73
8.	Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional	74
B.	Tahapan dan Skala Prioritas	75
1.	RPJM ke-1 (2005-2009)	75
2.	RPJM ke-2 (2010-2014)	77
3.	RPJM ke-3 (2015-2019)	79
4.	RPJM ke-4 (2020-2024)	80
5.	Tahun 2025	82
BAB V .	PENUTUP	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENGANTAR

1. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kabupaten Kulon Progo yang merupakan bagian dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sejak berdirinya Kabupaten Kulon Progo tahun 1950 Pada tanggal 1 Januari 1952 telah dilaksanakan penggabungan Kabupaten Kulon Progo wilayah Kasultanan dengan Kabupaten Adikarto wilayah Pakualaman. Pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak.
2. Wilayah Kulon Progo yang berada di wilayah paling barat dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada lintas jalur selatan Jawa, memiliki wilayah pantai, dataran rendah dan perbukitan Menoreh, memiliki potensi sumber daya alam di darat dan laut dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi modal dasar pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya dan khususnya Kabupaten Kulon Progo, sehingga dapat memberi peran dan kontribusi yang besar bagi kepentingan regional dan nasional. Untuk mencapai optimasi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut perlu mewujudkan perencanaan jangka panjang secara sistematis dan seksama.
3. Berdasarkan capaian keberhasilan, tantangan dan peluang serta penguatan otonomi, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dalam rangka mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang religius, sejahtera, aman dan dinamis. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan daerah tersebut perlu ditetapkan visi, misi dan arah pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 serta Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

B. PENGERTIAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan jabaran tujuan dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 tahun kedepan yang mencakup kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJP Daerah disusun dengan maksud menyediakan acuan bagi Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Kulon Progo untuk jangka waktu 20 tahun ke depan.

Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundangan tentang perencanaan pembangunan daerah.
2. Menyediakan dokumen dan pedoman perencanaan pembangunan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan daerah, masyarakat dan pelaku dunia usaha untuk menentukan arah pembangunan daerah, dengan berdasarkan pada kondisi riil, potensi daerah dan proyeksi ke depan.
3. Sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam menyusun RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, dan melaksanakan Musrenbang Daerah.

D. LANDASAN PENYUSUNAN RPJP KABUPATEN KULON PROGO

Landasan idiil dan konstitusional RPJP Kabupaten Kulon Progo adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Landasan operasional penyusunan RPJP Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025);
6. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4124;
9. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah No. 1 tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kulon Progo;
12. Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

E. TATA URUT

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kulon Progo Tahun 2005-2025 ini disusun dalam tata urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pengantar, pengertian RPJP Daerah, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum penyusunan, dan tata urutan penulisan.

BAB II. KONDISI UMUM

Bab ini menggambarkan kondisi daerah pada saat ini dengan maksud mengetahui keadaan daerah pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan berbagai kebijakan dan program daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah menyajikan kondisi dan tantangan tentang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sarana dan prasarana, politik, keamanan dan ketertiban, hukum dan aparatur, wilayah dan tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta modal dasar.

BAB III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN

Bab ini berisi perumusan visi dan misi untuk kurun waktu mulai dari tahun 2005 hingga 2025.

BAB IV. ARAH, TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Bab ini berisi arah pembangunan yang merupakan pelaksanaan misi untuk mencapai visi pembangunan serta memuat tahapan pembangunan yang dibagi dalam empat tahapan pembangunan jangka menengah (lima tahunan) serta prioritas pembangunan pada setiap tahapannya.

BAB V. PENUTUP

Berisi uraian bahwa RPJP Daerah adalah merupakan pedoman bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dalam melaksanakan pembangunan daerah.

BAB II

KONDISI UMUM

A. KONDISI SAAT INI

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

a. Kesehatan

- 1) Status gizi masyarakat khususnya balita dari tahun ke tahun berhasil ditingkatkan, namun demikian status gizi kurang dan buruk masih perlu diturunkan. Hal ini terlihat dari perkembangan setiap tahunnya sebagai berikut :

Tabel 1. Status Gizi Balita

Indikator Status Gizi Balita	Persentase jumlah balita menurut status gizi					
	Target	2001	2002	2003	2004	2005
Buruk	<2	1,0	1,4	1,08	1,29	1,13
Kurang	<11	20,02	18,74	13,35	13,65	11,61
Baik	>85	78,68	79,24	84,59	84,09	86,87
Lebih	<2	0,38	0,61	0,98	0,97	0,95

- 2) Angka kematian bayi (AKB) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 menunjukkan angka fluktuatif dimana tahun 2000 angka kematian bayi sebanyak 18,78/1000 kelahiran hidup; tahun 2001 13,14/1000 kelahiran hidup; tahun 2002 sebanyak 96 orang (14,21/1000 kelahiran hidup); tahun 2003 sebanyak 33 orang (9,08/1000 kelahiran hidup) ,tahun 2004 sebanyak 38 (10/1000 kelahiran hidup) dan tahun 2005 sebanyak 22 orang (13,32/1000 kelahiran hidup), sedang kasus kematian ibu tahun 2001 sebanyak 7 orang (109,56/100.000 kelahiran hidup); tahun 2002 sebanyak 11 orang (206/100.000 kelahiran hidup); tahun 2003 sebanyak 12 orang

(227,1/100.000 kelahiran hidup), tahun 2004 sebanyak 4 orang (76/100.000 kelahiran hidup) dan tahun 2005 sebanyak 5 orang (95,15/100.000 kelahiran hidup).

- 3) Fasilitas kesehatan yang tersedia meliputi rumah sakit umum 2 (dua) unit, satu milik daerah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Wates dan satu Rumah Sakit Swasta yaitu Rumah Sakit Umum Boro, Kalibawang, satu Rumah Sakit Khusus Bedah yaitu Kharisma dan 7 (tujuh) Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRKB). Kapasitas tempat tidur yang tersedia sebanyak 231 unit dilayani oleh 52 dokter dan 190 tenaga paramedis. Disamping itu terdapat 20 unit Puskesmas Umum maupun Puskesmas Rawat Inap dengan kapasitas 101 unit tempat tidur yang dilayani oleh 71 dokter, 362 tenaga paramedis dan 61 puskesmas pembantu serta 930 posyandu yang tersebar di setiap pedusunan.
- 4) Kondisi kesehatan masyarakat dilihat dari angka morbiditas (kesakitan) penyakit malaria terhadap jumlah penduduk dari tahun 2000 s/d tahun 2003 menunjukkan penurunan sebagai berikut: 8,59%; 8,35%; 6,33%; dan 0,70%. Angka morbiditas penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk dari tahun 2000 s/d tahun 2003 berturut-turut sebagai berikut : 9,95; 4,04; 13,43; dan 23,97. Angka morbiditas dari tahun 2000 s/d 2004 adalah sebagai berikut : 2,61%; 1,34%; 1,04%; 1,36% dan 1,50%. Angka morbiditas penyakit IPISA terhadap jumlah penduduk pada tahun 2000 s/d 2004 adalah sebagai berikut : 7,44%; 6,90%; 8,53%; 4,35% dan 10,72%.
- 5) Berdasarkan hasil Susenas tahun 2003 rumah tangga pengguna fasilitas air bersih dengan kriteria sendiri sebanyak 67.246 KK (66,65%), secara bersama sebanyak 27.996 KK (27,75%), secara umum sebanyak 5.187 KK (5,13%) dan tidak menggunakan sebanyak 461 KK (0,46%) dan pada tahun 2004 pengguna air bersih secara sendiri 67.675 KK (66,01%) secara bersama 20.225 KK (19,73%) secara umum 13.366 KK (13,04%) dan tidak menggunakan sebanyak 1.262 KK (1,23%). Sedang rumah tangga pengguna jamban keluarga berdasar Susenas pada tahun 2003 sebanyak 95.530 KK (99,65%), tidak menggunakan sebanyak 328 KK (0,35%) dan pada tahun 2004 sebanyak 96.935 KK telah menggunakan jamban keluarga.
- 6) Permasalahan bidang kesehatan antara lain masih terdapat balita dengan status gizi kurang dan gizi buruk, masih terdapat kematian bayi dan ibu melahirkan,

penanganan pelayanan kesehatan khususnya bagi masyarakat miskin belum optimal, kualitas pelayanan di pusat-pusat pelayanan kesehatan belum optimal. Juga masih terdapat sebagian masyarakat belum berperilaku bersih dan sehat, ketersediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan masih kurang, kondisi kesehatan lingkungan masih rendah, kuantitas dan kualitas air bersih masih rendah, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular belum optimal, terlebih penyakit malaria yang merupakan penyakit endemis, kondisi daerah rawan bencana yang berdampak pada kondisi kesehatan masyarakat, munculnya berbagai penyakit yang semula tidak diperhitungkan, kualitas dan jumlah sumber daya manusia bidang kesehatan yang masih terbatas.

- 7) Capaian keberhasilan pembangunan kesehatan ditandai dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Beberapa indikator tersebut antara lain meningkatnya angka harapan hidup pada tahun 2005 rata-rata mencapai 72,9 tahun, menurunnya angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), meskipun AKI dan AKB selalu fluktuatif namun angka tersebut masih jauh dibawah angka nasional (AKI Nasional 307/100.000 kh dan AKB Nasional 25/1000 kh), meningkatnya status gizi masyarakat terutama menurunnya kasus gizi buruk dan gizi kurang. Disamping itu keberhasilan lainnya diantaranya keberhasilan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular khususnya penyakit malaria dan penyakit infeksi lainnya, peningkatan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin .

b. Pendidikan

- 1) Rasio murid terhadap guru dari jenjang pendidikan tingkat dasar sampai pendidikan menengah atas dari tahun 2002 s/d 2005 mengalami penurunan sebagai berikut :

Tabel 2. Rasio Murid terhadap Guru

Tahun	SD/MI	SMP/MTS	SMA/SMK/MA
2002/2003	13	11	10,32
2003/2004	13	10,57	9,68
2004/2005	12	10	9,02

- 2) Berdasarkan hasil Susenas tahun 2004 tingkat pendidikan penduduk dapat digambarkan sebagai berikut : tidak/belum pernah sekolah 96.003 orang; tidak/belum tamat SD 38.956 orang; tamat SD 88.966 orang; tamat SMP/MTs 55.475 orang; tamat SMA/MA 31.1784 orang; tamat SMK 29.606 orang dan tamat akademi/PT sebanyak 18.708 orang termasuk sarjana/pasca sarjana; sedang yang tidak terjaring sebanyak 12.915 orang (penduduk yang merantau).
- 3) Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun ajaran 2004/2005 menurut jenjang pendidikan adalah sebagai berikut : Taman kanak-kanak 55,27; tingkat SD termasuk Paket A sebesar 105,34 dengan Angka Partisipasi Murni (APM) 88,72; tingkat SMP termasuk paket B sebesar 122,04 dengan APM 78,36; tingkat pendidikan SMA termasuk paket C APK sebesar 76,23 dengan APM sebesar 52,95.
- 4) Jumlah kelulusan tingkat pendidikan SD sebanyak 6.087 lulusan, yang tidak melanjutkan sebanyak 187 (3,07%); tingkat SLTP dan MTs sebanyak 6.321 terdiri dari : SLTP sebanyak 5.839 siswa dan MTs 482 siswa seluruhnya melanjutkan ke jenjang di atasnya, sedang tingkat pendidikan Sekolah Menengah dan Madrasah Aliyah lulus 5.012 terdiri SMA 1831 siswa; Madrasah 458 siswa dan kejuruan sebanyak 3.060 dan yang tidak melanjutkan sebanyak 964 orang (19,23%).
- 5) Indek Pembangunan Manusia di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2004 sebesar 70,90 dan tahun 2005 sebesar 71,53. Dirinci untuk komponen pendidikan, Kulon Progo sebesar 73,94 untuk tahun 2004 dan 74,84 untuk tahun 2005. Adapun komponen pembentuk IPM sebagaimana tabel di bawah :

Tabel 3. IPM dan Indeks Komponen Pembentuknya

Komponen IPM	2004	2005
Indeks Harapan Hidup	79,33	80,17
Indeks Pendidikan	73,97	74,84
Indeks Daya Beli	59,38	59,59
IPM	70,88	71,53

- 6) Pendidikan Anak Usia Dini yang dilaksanakan melalui PAUD di Kabupaten Kulon Progo mencapai 40,98% dari Jumlah anak usia 0-6 tahun sebesar 40.778 anak.

Lembaga PAUD di Kabupaten Kulon Progo 354 tempat dengan ruang kelas 376 dan jumlah guru 862 orang. Sarana dan prasarana penyelenggaraan PAUD masih belum optimal.

7) Pendidikan SD/MI

Pada tahun 2004/2005, jumlah SD 372 sekolah dengan siswa 36.940. MI sebanyak 25 sekolah dengan siswa sebanyak 1.705. Jumlah siswa baru kelas 1 SD/MI adalah 5.845 siswa, dan secara keseluruhan jumlah siswa SD dan MI 38.645 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 2.442. Adapun kondisi fisik ruang untuk kegiatan belajar mengajar tersebut adalah sebagai berikut; 982 (40,18%) dalam kondisi baik; 1.010 (41,32%) ruang kelas kondisi rusak ringan; 452 (18,50%) ruang kelas rusak berat.

Guru yang mengajar di SD/MI sebanyak 3.140 orang (dengan perincian 2.962 orang atau 94,3% adalah guru SD; 178 atau 5,7% adalah guru MI). Dari jumlah guru tersebut, guru SD yang layak mengajar 2.442 orang (82,4%); guru semi layak mengajar 494 orang (16%) dan tidak layak mengajar 26 orang (0,9%). Untuk guru MI, yang layak mengajar 152 orang (85,4%); guru semi layak mengajar 7 orang (0,6%), dan yang tidak layak mengajar 19 orang (10,7%). Apabila dilihat dari jumlah guru dengan kualifikasi di luar yang layak mengajar, menunjukkan bahwa ada sekitar 15% dari total guru di SD dan MI yang perlu ditingkatkan mutu pengajarannya, baik melalui kursus maupun pendidikan formal.

Untuk meningkatkan kegiatan belajar mengajar dibutuhkan sarana berupa perpustakaan sekolah, lapangan olah raga dan ruangan usaha kesehatan sekolah (UKS). Perpustakaan adalah satu penunjang keberhasilan pendidikan. Dari jumlah SD sebanyak 372, yang memiliki perpustakaan sekolah 152 (40,9%), lapangan olah raga 62 (16,7%), ruangan UKS 286 (79,9%). Sedangkan MI dengan jumlah sekolah 25, yang memiliki perpustakaan 6 (24%), tidak memiliki lapangan olah raga (0%), dan ruangan untuk kegiatan UKS 18 (72%).

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI 104,80%, sementara Angka Partisipasi Murni (APM) telah mencapai 88,72%. Untuk mencapai APK dan APM sebesar itu peranan dan kontribusi MI masih relatif kecil yaitu sekitar 4,9%.

Tinggi rendahnya efisiensi internal pendidikan dipengaruhi oleh besar kecilnya angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan. Angka mengulang masih cukup tinggi yaitu 5,27% pada tingkat SD, dan 7,26 % untuk MI, besarnya angka mengulang pada SD/MI berpengaruh negatif terhadap pencapaian efisiensi internal SD/MI. Selanjutnya angka putus sekolah untuk SD 0,25%, dan MI 0,59%. Sedangkan angka lulusan cukup baik yaitu 99,35% untuk tingkat SD, dan 100% pada tingkat MI.

8) Pendidikan SLTP dan MTs.

Tahun 2004/2005, jumlah SLTP 71 sekolah dengan siswa 17.237 dan MTs berjumlah 12 sekolah dengan 2.100 siswa. Siswa baru kelas 1 tingkat SLTP 5.922 siswa, dan 749 siswa baru pada MTs, dan secara keseluruhan baik tingkat SLTP maupun MTs terdapat 19.337 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas 949 unit, dengan perincian 881 (92,8 %) untuk SLTP dan 68 (7,2%) MI.

Gambaran fisik ruang kelas belajar untuk SLTP maupun MTs menunjukkan bahwa ruang kelas yang tersedia 626 (66%) dalam kondisi baik, 304 (302%) ruang kelas kondisi rusak ringan dan 19 (2%) ruang kelas rusak berat.

Jumlah guru yang mengajar di SLTP dan MTs 1.842 orang (1.616 orang guru atau 87,7% adalah guru SLTP, 226 atau 12,3 % guru MTs). Dari jumlah guru tersebut terdapat guru SLTP yang tidak layak mengajar sebanyak 255 orang (15,8%), semi layak mengajar 155 (9,6%) dan guru MTs yang tidak layak mengajar 14 orang (6,2%). Gambaran kualitas guru untuk tingkat SLTP maupun MTs ini masih perlu dibenahi atau diperbaiki. Hal ini ditunjukkan oleh relatif tingginya jumlah guru yang tidak layak mengajar pada tingkat SLTP/MTs tersebut. Untuk itu, perlu mendapat perhatian agar jumlah guru yang tidak layak mengajar dapat diatasi melalui berbagai program secara terencana dan berkesinambungan.

Ketersediaan sarana penunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs berupa fasilitas perpustakaan, lapangan olah raga dan ruangan UKS adalah sebagai berikut : Tingkat SMP, sekolah yang memiliki perpustakaan 62 unit (87,3%), lapangan olah raga 37 (52,11%), ruang UKS 56 (78,9%), dan 73 laboratorium. Sementara itu, sekolah MTs yang memiliki perpustakaan 10 (83,33%), ruang UKS 12 (seluruh

sekolah memiliki) lapangan olah raga 3 (25%) dan hanya 6 unit sekolah yang memiliki laboratorium.

Tinggi rendahnya efisiensi internal pendidikan dipengaruhi oleh besar kecilnya angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan. Angka mengulang 0,19% pada SMP, dan 0,32% pada MTs, besarnya kecilnya angka mengulang akan berpengaruh terhadap pencapaian efisiensi internal SLTP dan MTs. Selanjutnya angka putus sekolah pada SMP 0,36%, dan 0,26% pada MTs. Sedangkan angka lulusan cukup baik, tingkat SMP yaitu 100%, dan pada MTs 94,14 %.

9) Pendidikan SMU SMK dan MA.

Tahun 2004/2005, jumlah SMU 19 sekolah dengan siswa 5.024, dan MA 5 sekolah dengan siswa 1.259, dan SMK 30 sekolah dengan siswa 8.950. Jumlah siswa baru untuk kelas 1 SMA 1.587 siswa, dan 458 siswa baru pada MA, dan 3.060 siswa baru SMK. Jumlah seluruh siswa pada ketiga jenis sekolah tersebut adalah 15.260 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut tersedia ruang kelas sebanyak 547, dengan perincian kondisi fisik ruangan kelas 456 (83,4 %) kondisi baik, 76 (13,9%) rusak ringan, dan 15 (2,74%) rusak berat.

Jumlah guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA adalah 1.692 orang (dengan rincian 576 atau 34,1% adalah guru SMA, 963 atau 57% adalah guru SMK, dan 153 atau 9,22% guru MA). Dari jumlah tersebut, dilihat dari kualitas mengajar di kelas, terdapat guru SMA yang tidak layak mengajar 22 orang (3,9%) dan guru SMK 109 orang (11,4%), dan guru MA 7 orang (4,58%). Kualitas guru yang tidak layak mengajar masih relatif besar yaitu 8,2%. Kondisi ini perlu mendapat perhatian agar jumlah guru yang tidak layak mengajar dapat diatasi melalui berbagai program peningkatan mutu mengajar yang diupayakan oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan.

Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK, dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 47 unit (87%), lapangan olah raga sebanyak 33 (61,11%), ruang UKS sebanyak 30 (79,62%), dan laboratorium 38 (70,37%), ruang serbaguna 8 (14,81%), ruang ketrampilan 24 (44,44%), bengkel 19 (63,33%), dan ruang praktek tersedia sebanyak 26 (86,67%).

Sarana dan prasarana berupa alat praktek di SMK masih kurang dalam kuantitas dan tertinggal dari sisi teknologi.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA, SMK dan MA 75,05% dan APM 52,95%, dengan perincian SMA (APK 24,84% dan APM 17,68%), SMK (APK 44,02% dan APM 31,82%) serta MA (APK 6,29% dan APM 4,05%). Tinggi rendahnya efisiensi internal pendidikan dipengaruhi oleh besar kecilnya angka mengulang, angka putus sekolah dan angka lulusan. Angka mengulang 0,40% untuk SMA, 0,27% SMK, dan MA 0,16%. Besar kecilnya angka mengulang pada SMA akan berpengaruh terhadap pencapaian efisiensi internal SM Adan MA. Selanjutnya angka putus sekolah pada SMU 2%, 1,24% pada SMK, dan 1,89% pada MA. Sedangkan angka kelulusan cukup baik, SMA 100%, SMK 97,86% dan 74,87% untuk MA.

- 10) Siswa SMK yang tidak lulus hanya disediakan ujian kesetaraan paket C yang tidak mempunyai muatan kompetensi sesuai dengan kejuruan yang dimiliki oleh siswa dimaksud sehingga merugikan bagi siswa itu sendiri maupun data sumber daya manusia lulusan SMK.
- 11) Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan perlu dilakukan peningkatan baik kemampuan maupun ketrampilannya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga mampu bersaing di bursa ketenagakerjaan.
- 12) Telah dirintis Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Nasional Bertaraf International sebagai berikut: SDN 4 Wates sebagai Sekolah Persiapan Standar Nasional; SMP N 1 Wates, SMP N 1 Panjatan, SMP N 1 Temon sebagai Sekolah Standar Nasional dan SMP N 1 Galur sebagai Sekolah Standar Nasional dan Rintisan Bertaraf Internasional; SMAN 1 Wates sebagai Sekolah Standar Nasional; SMK N 1 Pengasih, SMK Muhammadiyah 2 Wates sebagai Sekolah Standar Nasional dan SMK N 2 Pengasih sebagai Sekolah Nasional Bertaraf Internasional.
- 13) Permasalahan bidang pendidikan pada dasarnya dapat dikategorikan kepada tiga hal, *pertama*, permasalahan perluasan dan pemerataan layanan pendidikan, yaitu masih rendahnya, rata-rata tingkat pendidikan masyarakat dimana 38,41% berpendidikan SD dan SMP, masih tingginya jumlah penduduk yang buta aksara, tingkat partisipasi masyarakat makin rendah pada jenjang yang makin tinggi, masih terdapat kesenjangan partisipasi pendidikan antar kecamatan, desa-kota dan antar jenis

kelamin, jumlah siswa mengulang kelas, khususnya pada tingkat SD/MI masih cukup tinggi, *kedua*, permasalahan peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, yaitu hasil evaluasi dan penilaian belajar siswa masih rendah dan adanya kesenjangan antar wilayah, masih terdapat guru yang tidak memenuhi kualifikasi kelayakan mengajar, kondisi sarana prasarana sarana yang masih terbatas, ketersediaan media pembelajaran seperti buku, alat peraga dan alat bantu lainnya masih belum dapat menunjang sepenuhnya pembelajaran berbasis kompetensi, dan kualitas lulusan lembaga pendidikan belum sepenuhnya relevan dan kompetitif dalam memasuki persaingan kerja, *ketiga*, permasalahan peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan, yaitu pengelolaan pendidikan pada sebagian satuan/lembaga masih perlu peningkatan efisiensi, produktivitas demokratisasi dan akuntabilitas, dan kapasitas pengelola satuan lembaga pendidikan masih perlu ditingkatkan serta peran serta masyarakat dan *stakeholder* belum optimal.

- 14) Capaian keberhasilan pembangunan bidang pendidikan antara lain tercapainya peningkatan perluasan pelayan dan pemerataan pendidikan yang ditandai meningkatnya jenjang, pemerataan dan kualitas pendidikan masyarakat, semakin berkurangnya angka mengulang dan ketidakkulusan siswa. Selanjutnya adanya peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan, tersedianya sarana, prasarana dan media pendidikan yang memenuhi standar kebutuhan, terpenuhinya kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatnya kualitas lulusan lembaga pendidikan yang mampu bersaing dalam pasar kerja nasional dan global, meningkatnya kualitas pengelolaan lembaga pendidikan serta meningkatnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan.

c. Kependudukan

- 1) Sesuai dengan data registrasi penduduk sampai dengan tahun 2006 jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo menunjukkan kecenderungan bertumbuh rata-rata sebesar 0,12% dengan kontribusi terbesar dari segmen perempuan (51,20%). Komposisi penduduk mencerminkan dominasi penduduk perempuan (51,15%) dibandingkan penduduk laki-laki (48,85%) dengan rasio seks 96 dan tingkat kepadatan penduduk

mencapai 760 jiwa/km². Sementara pencatatan di lapangan (sensus) menunjukkan laju pertumbuhan rata-rata sebesar -0,04%. Perbedaan ini menunjukkan mobilitas yang tinggi pada penduduk wilayah Kulon Progo, terutama sebagai pekerja migran, baik regional, nasional maupun internasional. Kecenderungan penempatan kerja menunjukkan adanya peningkatan pada modus penempatan antar daerah (AKAD) dan antar negara (AKAN).

Tabel 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Registrasi

No.	Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% +
1	2002	218.248	229.595	447.843	-
2	2003	219.918	229.893	449.811	0,44
3	2004	221.326	231.486	452.812	0,67
4	2005	222.567	233.122	455.689	0,64
5	2006	224.779	235.316	460.095	0,97
Trend		218.225	228.948	447.174	0,12
%		48,80	51,20	100,00	-

Tabel 5. Prosentase Penduduk berdasarkan Registrasi

No.	Tahun	%	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2002	%	48,73	51,27	100,00
2	2003	%	48,89	51,11	100,00
3	2004	%	48,88	51,12	100,00
4	2005	%	48,84	51,16	100,00
5	2006	%	48,85	51,15	100,00

- 2) Sementara itu, persebaran penduduk menunjukkan konsentrasi penduduk di wilayah-wilayah urban seperti di Wates, Pengasih, Sentolo, Panjatan, Galur, dan Nanggulan. Pengamatan Mengenai kepadatan penduduk wilayah fungsional perkotaan menunjukkan peningkatan yang tinggi, dari 8 menjadi 13 wilayah fungsional perkotaan yang semuanya hampir berada di kawasan urban. Hal ini menunjukkan persebaran penduduk mengikuti lokus pusat-pusat pertumbuhan. Persebaran penduduk wilayah urban ini tidak selalu koresponden dengan persebaran penduduk menurut wilayah administrasi, meskipun kecenderungan umum pertumbuhan penduduk mengikuti pertumbuhan perkotaan tetap nampak.

- 3) Pada sisi yang lain, kualitas penduduk menunjukkan indikasi peningkatan yang cukup baik. Indeks pembangunan manusia (IPM) terus menerus terjadi peningkatan secara positif hingga mencapai angka 71,98. Peningkatan ini diikuti oleh seluruh komponen pembentuk IPM. Meskipun demikian pentahapan kualifikasi kesejahteraan keluarga menunjukkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian. Kelompok keluarga sejahtera III dan III plus cenderung naik, tetapi keluarga pra sejahtera hingga kelompok keluarga sejahtera II mengalami penurunan yang cukup besar. Kelompok-kelompok keluarga pra sejahtera hingga keluarga sejahtera II merupakan kelompok terbesar (85,18%) dalam struktur pentahapan keluarga sejahtera ini.

Tabel 6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No.	Komponen IPM	2004	2005	2006
1	Indeks Harapan Hidup	79,33	80,17	80,56
2	Indeks Pendidikan	73,97	74,84	75,58
3	Indeks Daya Beli	59,38	59,59	59,81
	IPM	70,90	71,53	71,98

Tabel 7. Prosentase Tahapan Keluarga Sejahtera

No.	Tahapan Keluarga Sejahtera	2002	2003	2004	2005	2006	Trend
1	Pra Keluarga Sejahtera	41,92	40,89	39,48	40,21	41,43	41,12
2	Keluarga Sejahtera I	24,72	24,61	24,70	24,67	19,57	25,70
3	Keluarga Sejahtera II	16,88	17,96	18,47	18,17	13,23	18,36
4	Keluarga Sejahtera III	12,46	12,85	13,50	13,19	20,96	11,12
5	Keluarga Sejahtera III plus	4,04	3,69	3,84	3,77	4,80	3,71

- 4) Pembangunan bidang kependudukan diarahkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup, sumber daya manusia (*human resource*), kesejahteraan keluarga dan pemerataan distribusinya, serta pemberdayaan keluarga yang berkualitas. Sehubungan dengan arah pembangunan bidang kependudukan ini maka diperlukan penyusunan rencana induk pengembangan sebagai suatu rekayasa sosial yang mempresentasikan profil kependudukan yang diharapkan, desain model yang dianjurkan untuk mencapai profil yang diharapkan dan antisipasi terhadap kegagalan

model. Untuk mendukung rekayasa sosial kependudukan ini diperlukan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang seksama (Nomor Induk Kependudukan) dengan berbasis teknologi informasi

d. Keluarga Berencana (KB)

- 1) Pelaksanaan program Keluarga Berencana telah mampu menumbuhkan kesadaran bagi para keluarga untuk melaksanakan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS). Hal ini tercermin dari menurunnya angka rata-rata jumlah anggota rumah tangga menjadi 4 orang, tingginya angka kesertaan KB, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, menurunnya angka pertumbuhan penduduk serta tingginya tingkat partisipasi/peran serta masyarakat atau keluarga dalam pengelolaan Program Keluarga Berencana.
- 2) Akseptasi program KB juga menunjukkan peningkatan yang cukup memadai jauh di atas rata-rata kecenderungan pertumbuhan yang semakin mendekati angka nol. Jumlah peserta KB aktif setiap tahun mengalami kenaikan rata-rata sebesar 3,55%. Jumlah pasangan usia subur (PUS) juga menunjukkan kenaikan rata-rata setiap tahunnya sebesar 2,31%. Peningkatan akseptor aktif 1,2% lebih cepat daripada peningkatan PUS. Program KB telah memberikan kontribusi yang besar terhadap upaya pengendalian jumlah penduduk.

Tabel 8. Peserta KB dan Pasangan Usia Subur (PUS)

No	Tahun	Jumlah PUS	% + PUS	Akseptor	% + Akseptor
1	2001	60.136		42.758	
2	2002	62.314	3,62	44.358	3,74
3	2003	63.055	1,19	45.092	1,65
4	2004	63.977	1,46	45.788	1,54
5	2005	64.386	0,64	49.108	7,25

- 3) Penyelenggaraan program KB tidak hanya diarahkan untuk menurunkan tingkat fertilitas semata, tetapi juga untuk mendorong terwujudnya Keluarga Sejahtera. Realisasi keluarga sejahtera dimaksudkan untuk mewujudkan partisipasi aktif masyarakat terhadap program KB dan untuk mendorong terwujudnya norma

keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Untuk mendukung penyelenggaraan program KB ini perlu dilakukan upaya-upaya yang terus menerus dan berkesinambungan untuk mensosialisasikan dan mempromosikan norma keluarga sejahtera dan berkualitas melalui berbagai media dan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dengan meningkatkan partisipasi, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan.

e. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- 1) Lebih dari 82% penduduk Kabupaten Kulon Progo merupakan tenaga kerja, dan hampir 63%nya merupakan angkatan kerja (AK/P). Dari keseluruhan jumlah penduduk yang betul-betul bekerja sejumlah 59,73% (B/P) yang menurun 0,14% dari tahun sebelumnya. Kesempatan kerja terbuka cukup besar (PK/AK) hampir 14%, yang merupakan peningkatan lebih dari 11% dari tahun sebelumnya, tetapi penempatan kerja (PB/AK) hanya mampu sekitar 1,5%, dan lebih rendah dari tahun sebelumnya 1,73%. Angka pengangguran (BKM/AK) mencapai kurang dari 5% dan jauh dari angka tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 5,5%. Meskipun demikian angka pengangguran relatif (setengah menganggur) mencapai rata-rata 13%. Angka pengangguran ini kebanyakan didominasi oleh segmen penduduk berpendidikan menengah ke bawah, mulai dari SLTA hingga tidak tamat SD. Kebanyakan angka pengangguran ini terserap dalam sektor informal, terutama di sektor mengurus rumah tangga dan pertanian. Sektor ini mampu menyerap lebih dari 80% tenaga kerja.
- 2) Penempatan kerja menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pada modus penempatan antar daerah (AKAD) dan antar negara (AKAN). Penempatan kerja oleh Pemerintah (PKP) dan penempatan kerja lokal (AKL) relatif kecil. Sedang penempatan kerja antar daerah (AKAD) dan luar negeri (AKAN) menunjukkan angka peningkatan yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat mobilitas penduduk cukup tinggi dan mengarah pada pergerakan ke luar daerah. Mobilitas eksternal penduduk telah mempengaruhi secara positif pada tingkat kesejahteraan penduduk seperti ditunjukkan oleh tingkat devisa yang masuk ke Kabupaten Kulon Progo dan perputarannya. Penempatan tenaga kerja melalui modus transmigrasi yang

mencerminkan program mobilitas penduduk secara sistematis turut serta memperkuat pergerakan penduduk ke luar daerah ini.

Tabel 9. Angkatan Kerja dan Penyerapan Kerja

No.	Uraian	2005	2006	% +
1	Jumlah Penduduk (P)	455.689	460.095	0,97
2	Tenaga Kerja (TK)	377.641	379.106	0,39
3	Angkatan Kerja (AK)	288.623	289.216	0,21
4	Bekerja (B)	272.591	274.831	0,82
5	Mencari Pekerjaan (BK)	9.729	3.893	(59,99)
6	Menganggur (BKM)	16.032	14.385	(10,27)
7	1/2 Menganggur (BKM1/2)	39.253	38.966	(0,73)
8	Penempatan (PB)	5.003	4.438	(11,29)
9	Penyerapan (PK)	35.894	40.000	11,44
10	% TK/P	82,87	82,40	(0,57)
11	% AK/P	63,34	62,86	(0,75)
12	% AK/TK	76,43	76,29	(0,18)
13	% B/P	59,82	59,73	(0,14)
14	% B/AK	94,45	95,03	0,62
15	% BK/P	2,14	0,85	(60,37)
16	% BK/AK	3,37	1,35	(60,07)
17	% BKM/P	3,52	3,13	(11,13)
18	% BKM/AK	5,55	4,97	(10,46)
19	% BKM 1/2/P	8,61	8,47	(1,68)
20	% BKM 1/2/AK	13,60	13,47	(0,93)
21	% PB/AK	1,73	1,53	(11,48)
22	% PK/AK	12,44	13,83	11,21

Tabel 10. Jumlah Penganggur Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Tahun 2005)

No	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	SD Tidak Tamat	552	656	1.208	7.5
2	SD Tamat	1.775	1.929	3.704	23.1
3	SLTP	2.301	2.361	4.662	29.1
4	SLTA	2.733	2.736	5.470	32.1
5	Akademi	204	212	417	2.6
6	PT	282	290	572	3.5
	Jumlah	7.848	8.184	16.032	

- 3) Pembangunan bidang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kerja dan penempatan kerja yang secara langsung akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran. Untuk mendukung arah pembangunan bidang ketenagakerjaan ini perlu dilakukan upaya-upaya untuk membuka lapangan kerja yang sesuai dengan basis pendidikan calon tenaga kerja baik lokal, regional, antar daerah maupun antar negara. Peningkatan mutu SDM calon tenaga kerja baik sektor formal maupun informal melalui lembaga pendidikan dan pelatihan formal, non formal dan informal serta upaya-upaya pemagangan, kerjasama berbagai pihak yang terlibat, promosi dan pengembangan jaringan informasi berbasis teknologi informasi sangat diperlukan untuk mengkondisikan sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja dapat terserap sepenuhnya dalam bursa kerja termasuk pasar kerja transmigrasi, mengingat penempatan dan animo untuk bertransmigrasi cukup tinggi. Animo ini terindikasi dalam target penempatan yang hampir seluruhnya dapat dipenuhi.
- 4) Disamping itu pembangunan transmigrasi dimaksudkan untuk menyediakan tenaga kerja, lapangan dan kesempatan kerja juga untuk memfasilitasi pemerataan dan penyebaran penduduk, serta untuk mendorong pengembangan wilayah. Secara umum modus transmigrasi ini dipandang positif baik secara regional maupun nasional. Peningkatan pelayanan, fasilitasi dan kualitas SDM serta kualitas sarana dan prasarana pendukung perlu direalisasikan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan calon transmigran dan transmigran sebagai wujud respons terhadap berbagai kekurangan dalam penyelenggaraan transmigrasi.

Tabel 11. Target dan Realisasi Pelaksanaan Transmigrasi

No	Tahun	Target (KK)	Realisasi	
			KK	Jiwa
1	2000	19	19	73
2	2001	70	68	223
3	2002	75	75	263
4	2003	75	74	268
5	2004	85	85	278
6	2005	45	45	147

f. Kesejahteraan Sosial

- 1) Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 22 jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dibagi dalam 8 kelompok PMKS yang menonjol yaitu keluarga miskin sebanyak 42.345 KK, persebarannya mayoritas berada di pegunungan dan wilayah pantai. Penduduk lansia terlantar sebanyak 5.193 orang; anak terlantar sebanyak 3.846 orang; penyandang cacat sebanyak 3.301 orang; keluarga bertempat tinggal di daerah rawan bencana sebanyak 3.251 KK; keluarga berumah tak layak huni sebanyak 3.158 KK; wanita rawan sosial sebanyak 2.071 orang dan anak cacat 961 anak.
- 2) Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam penanganan PMKS yaitu Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS); Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM); Panti Sosial Swasta (9 unit); Karang Taruna dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) di 88 desa dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS).
- 3) Lembaga Pemerintah yang menangani PMKS antara lain Bagian Kesra Setda Kabupaten Kulon Progo, Dinas Dukcapilkabermas dan Seksi Kesejahteraan di 12 Kecamatan.
- 4) Perlu keterpaduan antara pusat dengan daerah dalam menangani PMKS baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.
- 5) Permasalahan pembangunan bidang kesejahteraan sosial antara lain masih tingginya masyarakat miskin, meningkatnya kualitas dan kuantitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), keterbatasan sarana dan prasarana penanganan PMKS, jumlah, kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia yang menangani PMKS masih rendah, kelembagaan pemerintah yang ada saat ini kurang memadai, potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) kurang berkualitas, sering terjadi bencana alam baik banjir, kekeringan dan tanah longsor yang menambah permasalahan kesejahteraan sosial.
- 6) Capaian keberhasilan pembangunan bidang kesejahteraan sosial antara lain ditentukan adanya kebijakan yang memihak kepada penyandang masalah

kesejahteraan sosial, mendekatkan akses keuangan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kerjasama dengan badan-badan dan lembaga sosial.

g. Kebudayaan

- 1) Di wilayah Kabupaten Kulon Progo terdapat berbagai jenis perkumpulan kesenian sebagai berikut: seni tari sebanyak 261, seni musik 478, seni teater 164 dan kesenian seni rupa sebanyak 84 yang terdiri dari seni lukis 17 kelompok; seni ukir 19 kelompok; seni dekorasi 19 kelompok; seni tatah wayang kulit 8 kelompok dan seni empu keris 1 kelompok yang berada di Kecamatan Kalibawang. Frekuensi pementasan/pertunjukan kesenian-kesenian tersebut masih cukup baik. Hal ini dapat terlaksana karena pemerintah selalu menyelenggarakan festival baik di tingkat kabupaten dan propinsi. Di samping itu pada acara 17 Agustusan, hari jadi maupun acara hajatan serta bersih pedukuhan/desa di wilayah.
- 2) Upacara adat yang masih dilestarikan kurang lebih sebanyak 41 macam, antara lain: Saparan, Rebo Wekasan, Nyadran, Nawu Sendang, Bersih Pedukuhan dan Desa, Ruwatan Agung Gunung Lanang, Dulkaidahan, Rejeban, Guru Bugi, Jamasan Pusaka Suralaya, Baritan, Ngrapyak Sendang, Pon-Ponan Masjid Sunan Kalijaga dan Tungkep Tandur, kegiatan upacara adat tersebut masih berjalan/dilaksanakan. Upacara Adat Saparan dilakukan pada setiap bulan Sapar pada malam Selasa/Jum'at Kliwon, Rebo Wekasan dilaksanakan akhir hari Rabu setiap bulan Sapar; Nyadran dilakukan setiap bulan Ruwah; Nawu Sendang Klampok dan jamasan Pusaka Suralaya dilaksanakan pada malam 1 Syuro; Baritan dan bersih desa dilakukan pada waktu habis panen padi yang dimitoskan adalah Dewi Sri. Dari dua belas kecamatan yang ada di Kulon Progo sebagian besar memiliki legenda dan cerita rakyat berjumlah sekitar 60 macam. Dari cerita rakyat/ legenda tersebut yang telah diterbitkan antara lain asal-usul Clereng (tahun 2003), legenda Suroloyo (tahun 2003), Gunung Lanang (2003), Kyai Jero di Pringtali Jatimulyo (2004), Ki Gonotirto di Hargotirto (2004) dan Batu Beranak Siyos di Glagah (2004). Sedang tahun 2006 akan diterbitkan Sremoyo di Sermo, Nyi Rongkot di Kebonrejo dan Kyai Dalmudal di Kaligintung. Bahasa Jawa sebagai bahasa ibu masih tetap dipertahankan oleh masyarakat.

- 3) Himpunan Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Kulon Progo terdapat 21 organisasi HPK terdiri dari Organisasi Pusat dan Cabang. Tempat pelaksanaan ritual dari penganut HPK dilaksanakan di rumah pribadi dari masing-masing anggota paguyuban, sedangkan pertemuan rutin sebagian anggota organisasi dilaksanakan setiap selapan hari pada hari Minggu Kliwon
- 4) Kesenjangan di Kabupaten Kulon Progo cukup banyak, namun belum semua potensi tersebut dapat dikelola dengan baik, seperti perpindahan pemerintahan, perjuangan tentara pelajar dan sebagainya. Kepurbakalan di Kabupaten Kulon Progo berupa Benda Cagar Budaya (BCB) dan situs serta warisan budaya. Benda Cagar Budaya tersebar di lokasi wilayah Kulon Progo kurang lebih 222 buah, sedang warisan budaya berupa bangunan gaya tradisional Yogyakarta (joglo, limas, kampung), gaya Indishe, China dan sebagainya. Permuseuman dalam tahap rintisan bertujuan untuk meningkatkan pengamanan, perawatan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan perlu adanya museum yang memadai. Museum rintisan menggunakan Bale Agung dengan koleksi 39 BCB dan koleksi tambahan berupa mata uang logam, alat batik, mascot kumpyung dan kerajinan enceng berbentuk guci. Perawatan dan pemeliharaan benda cagar budaya dilakukan dengan cara: Penambahan koleksi berupa cap batik mata uang serta benda cagar budaya. Pendataan ulang dan pembinaan perawatan serta pengambilan benda cagar budaya untuk disimpan di museum. Pendanaan dan perawatan kegiatan selama ini menggunakan dana APBD Kabupaten. Bangunan bernilai sejarah yang telah berubah fungsi adalah Pesanggrahan Kasultanan di Bulu Kecamatan Pengasih yang pada saat sekarang dipergunakan masyarakat sebagai Balai Pertemuan.
- 5) Pengembangan nilai-nilai budaya gotong royong dapat diperlihatkan antara lain dalam bersih desa, mendirikan rumah, hajatan dan dengan adanya kegiatan kerukunan masyarakat di Perbukitan Menoreh, yaitu berupa selamatan perlindungan mata air atau merti bumi. Sedangkan kegiatan yang bersifat religius antara lain seperti MTQ, STQ, pengajian Akbar, Istigosah, Ziarah keagamaan dan lainnya berupa kegiatan sosial religius berupa khitanan massal, pengumpulan zakat fitrah, yang kesemuanya merupakan pencerninan eksistensi jati diri masyarakat Kabupaten Kulon Progo.

h. Agama

- 1) Penduduk Kabupaten Kulon Progo adalah pemeluk Agama Islam, Kristen, Katholik, Budha dan Hindu. Secara umum kehidupan beragama cukup baik ditunjukkan dengan adanya toleransi umat beragama yang cukup tinggi. Di lingkungan masyarakat telah tumbuh kesadaran yang kuat untuk membangun kerukunan umat beragama dan hubungan internal dan antar umat beragama yang aman, damai, dan saling menghargai. Namun demikian ajaran agama belum sepenuhnya mampu membangun etos kerja serta pesan moral belum sepenuhnya dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pembangunan bidang agama diantaranya terciptanya kerukunan antar umat beragama dan umat seagama, terselenggaranya kegiatan keagamaan yang kondusif serta adanya bantuan keagamaan dalam pembangunan sarana prasarana keagamaan serta adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan.
- 2) Upaya membangun kerukunan inter dan antar umat beragama, terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan inter dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai.
- 3) Jumlah tempat peribadatan dari masing-masing agama adalah sebagai berikut Masjid 975 buah, Mushola 329 buah, langgar 660 buah, gereja 28 buah dan rumah kebaktian 33 buah. Jumlah organisasi keagamaan yang ada sebanyak 202 organisasi, meliputi Islam 151 organisasi, Kristen 12 organisasi dan Budha satu organisasi.
- 4) Upaya membangun kerukunan inter dan antar umat beragama, terciptanya harmoni sosial dalam kehidupan inter dan antar umat beragama yang toleran dan saling menghormati dalam rangka menciptakan suasana yang aman dan damai. Hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh pemimpin-pemimpin keagamaan yang masih menjadi figur panutan.

2. Ekonomi

a. Perekonomian Daerah

- 1) PDRB Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp. 1.835.822.000.000,- pada tahun 2004. Ini berarti terjadi kenaikan sebesar Rp. 644.409.000.000,- dari tahun 2000 dengan nilai PDRB pada saat itu sebesar Rp. 1.190.413.000.000,-.

Tabel 12. Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga Konstan 2000

No.	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)	PDRB per Kapita (Rp)
1	2001	3,66	3.328.077.
2	2002	4.12	3.470.383
3	2003	4.19	3.561.328
4	2004	4.52	3.714.957
5	2005	4.77	3.9732.735

- 2) Kontribusi PDRB berdasar lapangan usaha selama lima tahun terakhir masih didominasi oleh sektor pertanian sebanyak 29,65%, sedang yang terendah listrik, air bersih sebanyak 0,49% pada tahun 2000. Pada tahun 2004 menjadi 25,24% untuk sektor pertanian dan 0,82% untuk listrik, air minum.

Tabel 13. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah

URAIAN	2003	2004	2005	2006
PENDAPATAN	286.643.226.4	296.569.116.8	307.791.005.1	448.371.802.7
	82	54	56	82
1. PAD	18.250.897.19	19.834.963.14	24.332.483.44	35.203.275.12
	1	5	6	2
2. Dana Perimbangan	241.450.768.9	248.864.580.5	268.068.878.9	411.311.701.1
	84	91	14	74
3. Lain-lain Pendapatan	26.941.557.30	27.869.573.11	15.389.642.79	1.856.826.485
	5	7	6	
BELANJA	282.170.746.7	311.299.867.3	286.529.399.1	458.909.842.1
	13	30	40	11
1. Aparatur	99.881.221.64	39.521.330.82	41.001.417.59	62.469.375.17
	3	0	6	8
2. Publik	182.289.525.0	271.778.536.5	245.527.981.5	396.440.466.9
	70	09	43	33

- 3) Peran sektor primer masih sangat kuat sebesar 51,29% pada tahun 2003 dan 52,65% pada tahun 2004. Sedangkan sektor sekunder mengalami penurunan perannya, pada tahun 2003 sebesar 22,07% menjadi sebesar 21,22% pada tahun 2004. Untuk sektor tersier sebanyak 26,64% pada tahun 2003 menjadi sebesar 26,14% pada tahun 2004.
- 4) Krisis ekonomi tahun 1997 berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo. Pada tahun 1997 pertumbuhan ekonomi sebesar 2,58%, langsung turun drastis sebesar -14,03% pada tahun 1998. Pada tahun 1999 masih turun menjadi -10,06%. Tahun 2000 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo kembali positif sebesar 1,96 persen.

b. Pertanian

- 1) Pertanian di Kab.Kulon Progo meliputi pertanian tanaman pangan hortikultura, kehutanan perkebunan, peternakan, kelautan perikanan. Dari hasil sensus pertanian tahun 2003, penduduk Kabupaten Kulon Progo mayoritas berusaha pada sektor pertanian. Dari 103.450 rumah tangga sebanyak 80.685 (77,99%) merupakan rumah tangga pertanian dan 61.760 (76,54%) rumah tangga pertanian tergolong rumah tangga petani kecil (pemilikan lahan <0,5 Ha).
- 2) Luas lahan pertanian sawah seluas 10.874 Ha, dengan jenis irigasi teknis sebesar 7.271 Ha (66,79%), irigasi setengah teknis 1.160 Ha (10,66%), daerah irigasi kecil 957 Ha (8,9%) dan tadah hujan sebanyak 1.486 Ha (13,65%). Sedangkan luas lahan kering seluas 47.741 Ha dengan rincian 19.274 Ha (40,37%) merupakan lahan pekarangan/lahan untuk bangunan dan lahan tegal/kebun seluas 15.413 Ha (32,28%) hutan seluas 1.045 Ha (2,19%) dan lahan lainnya seluas 12.012 Ha (25,16%). Dampak perluasan areal pekarangan/lahan untuk bangunan berakibat produksi tanaman padi/palawija mengalami penurunan.
- 3) Hasil tanaman perkebunan sangat potensial di seluruh kecamatan terutama adalah kelapa, sedang wilayah perbukitan potensial tanaman cengkeh. Populasi tanaman hasil hutan terutama perkayuan adalah jati, sonokeling, mahoni, dan akasia. Hasil tanaman tersebut dapat menopang perekonomian rumah tangga pertanian karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Populasi ternak besar yang potensial adalah sapi, kambing dan domba, sedangkan untuk ternak unggas adalah ayam buras, ayam

ras dan puyuh, dan dari peternak unggas tersebut sebagian besar petani unggas kondisinya masih belum mandiri dan rata-rata menjadi buruh ternak. Pemanfaatan pekarangan untuk budidaya perikanan darat, khususnya kolam masih merupakan pekerjaan/penghasilan sampingan. Sedangkan untuk perikanan laut telah dilakukan penangkapan menggunakan perahu tempel di wilayah selatan yaitu Pantai Trisik, Bugel, Glagah dan Congot.

- 4) Permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Kulon Progo diantaranya : Usaha pertanian yang secara umum merupakan usaha skala kecil dengan penguasaan lahan sempit, belum mengarah pada pasar, nilai tukar produk pertanian rendah dan berfluktuasi, harga sarana produksi pertanian tinggi, adanya resiko serangan hama penyakit dan perubahan gejala alam (bencana alam). Dukungan permodalan dan sarana prasarana pertanian relatif masih terbatas dan demikian pula penguasaan teknologi tata tanam, pasca panen dan deversifikasi hasil pertanian masih belum optimal.

c. Penanaman Modal

- 1) Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah serta menggerakkan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat maka upaya menarik investasi merupakan salah satu kebutuhan pokok sebagai bagian dalam pengembangan daerah. Hal itu memicu persaingan antar daerah untuk menarik investasi sebagai bagian dalam strategi pembangunan daerah.
- 2) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo senantiasa berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha serta kemudahan perijinan. Hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan iklim investasi yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian daerah. Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah dengan memberikan fasilitas kemudahan akses data dan informasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha, baik itu mengenai potensi daerah, komoditas unggulan, fasilitas infrastruktur pendukung, sektor-sektor andalan serta kebijakan atau regulasi
- 3) Secara umum Kabupaten Kulon Progo memiliki banyak potensi investasi yang bisa ditawarkan kepada investor untuk mengolah, mengembangkan maupun

memasarkannya. Bidang-bidang yang memiliki prospek baik untuk dikembangkan sebagai peluang investasi antara lain bidang pertanian, perdagangan, industri, pariwisata, pertambangan, perhubungan maupun bidang kesehatan dan pendidikan. Namun demikian perkembangan Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 1995 – 2004 belum begitu menggembirakan. Sampai dengan tahun 2004 tidak ada PMA yang menanamkan modalnya di Kabupaten Kulon Progo, sedangkan jumlah PMDN yang ada baru 2 perusahaan yaitu, PT Pagilaran yang memproduksi teh dan PT. Aneka Sinendo yang memproduksi arang briket.

- 4) Rendahnya perkembangan Penanaman Modal disebabkan oleh beberapa faktor baik ekstern maupun intern. Faktor ekstern yang mempengaruhi rendahnya minat investor untuk masuk ke Kabupaten Kulon Progo antara lain adalah masih adanya tarik ulur kewenangan dengan Pemerintah Pusat yang ditandai dengan masih berlakunya peraturan yang sudah tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah. Sedangkan faktor intern yang mempengaruhi antara lain adalah kurangnya kesiapan daerah dalam menarik minat investor, kurang tegasnya komitmen bersama dari semua pihak untuk memfasilitasi calon investor baik dari sisi pelayanan maupun dalam penyediaan sarana prasarana yang memadai di lokasi potensi investasi.
- 5) Investasi non fasilitas (non PMA/PMDN) mengalami perkembangan yang baik dari tahun ke tahun. Investasi non fasilitas sampai dengan tahun 2004 mampu menyerap 54.505 tenaga kerja dan kebanyakan merupakan UKM dengan omzet produksi lebih dari Rp. 268 milyar.

Tabel 14. Nilai Investasi di Kabupaten Kulon Progo tahun 2005

No	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nilai Investasi	Jumlah TKI
1.	PT. Pagilaran	Pabrik Teh hijau	1.411.749.652	80
2.	PT. HM Sampurna	Rokok Kretek	4.010.000.000	1.511
3.	Agro Wisata Kusuma Wanandri	Agro Wisata	3.500.000.000	38
4.	Pusat Penyelamatan Satwa (PPSJ)	Konservasi Lingkungan	7.390.000.000	43

5.	PT.Aneka Sinendo	Industri Arang Briket	6.852.191.000	110
----	------------------	--------------------------	---------------	-----

- 6) Letak strategis Kulon Progo yang berada di jalur jalan nasional yang menghubungkan Jakarta-Surabaya melalui jalur selatan bisa menempatkan Kulon Progo sebagai pusat pertumbuhan perdagangan yang menghubungkan DIY dengan Jawa Tengah bagian barat seperti Purworejo, Kebumen, Cilacap dan Purwokerto. Disamping memiliki nilai strategis Kulon Progo juga memiliki ekonomis untuk dikembangkannya pelabuhan, bandara dan Industri.

d. Koperasi dan UKM

- 1) Salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar masyarakat adalah melalui pemberdayaan koperasi dan UKM. Pemberdayaan UKM akan mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin
- 2) Koperasi sebagai alternatif peningkatan perekonomian tetap diminati oleh masyarakat Kabupaten Kulon Progo. Perkembangan Koperasi di Kabupaten Kulon Progo dari segi kuantitas dapat berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah koperasi sebanyak 246 unit terdiri dari 12 KUD dan 234 Non KUD serta 2.126 UKM.
- 3) Nilai simpanan mencapai Koperasi, KUD dan non KUD sebesar 12,58 milyar rupiah dan volume usahanya mencapai 36,29 milyar rupiah. Pada tahun 2004 besarnya cadangan dengan nilai 15,57 milyar rupiah, piutang sebesar 13,40 milyar rupiah dan dana yang tersedia sebesar 1,17 milyar rupiah.
- 4) Perkembangan koperasi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan baik dalam kualitas sumber daya manusia pengelola, organisasi dan manajemen, teknologi, akses informasi, pemasaran dan pengembangan bidang usahanya yang selama ini hanya didominasi pada usaha simpan pinjam. Dalam rangka memberikan akses keuangan

kepada UKM di Desa telah disalurkan Dana sebesar 44 milyar melalui Lembaga Keuangan Mikro di Desa.

- 5) Permasalahan di bidang koperasi dan UKM antara lain kualitas SDM pengelola koperasi dan UKM anggota koperasi dalam bidang organisasi, penguasaan teknologi, manajemen serta jiwa wirausaha masih terbatas, keterbatasan permodalan bagi koperasi dan UKM anggota koperasi, peran lembaga Koperasi dan UKM anggota Koperasi belum optimal, kemampuan pengembangan usaha koperasi masih belum optimal, akses pasar dan persaingan produk UKM dalam meraih pasar masih sangat terbatas.
- 6) Masih banyak UKM yang belum melakukan ekspor langsung dengan *buyer* dan hanya sebagai pemasok ke pengusaha besar.

e. Perindustrian

- 1) Jenis industri di wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi industri menengah dan industri kecil/rumah tangga. Pada tahun 2004 industri menengah berjumlah 4 unit dengan nilai investasi sebesar Rp. 11.812.680.000,- menyerap tenaga kerja sebanyak 2.078 orang dengan omzet senilai Rp. 99.161.208.000,- sedangkan industri kecil/rumah tangga berjumlah 20.061 menyerap sebanyak 52.427 orang dengan nilai investasi sebesar Rp. 35.716.947.000,- dan menghasilkan omzet sebesar Rp. 168.951.973,-.
- 2) Apabila dilihat dari struktur industri di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2004 menunjukkan dari tahun ke tahun terdapat peningkatan Unit Usaha (UU), Tenaga Kerja, Produksi dan Investasi. Dengan adanya krisis ekonomi pada tahun 1998 ternyata justru menguntungkan sekali bagi industri yang berorientasi ekspor. Disamping hal-hal tersebut diatas, dengan berkembangnya unit usaha akan menyerap banyak tenaga kerja dan mengarah juga pada usaha padat karya tenaga kerja.
- 3) Permasalahan di bidang industri antara lain kualitas masih rendah dan kontinuitas produk belum stabil, masih lemah dalam kemampuan dan ketrampilan sumber daya manusia, produktivitas, masih rendahnya inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan teknologi, keterbatasan permodalan, manajemen dan pemasaran,

ketergantungan bahan baku dari luar daerah, dan rendahnya daya saing produk serta efisiensi.

f. Perdagangan

- 1) Sarana dan prasarana perdagangan yang ada sampai dengan tahun 2004 meliputi pasar tradisional 31 unit, pasar swalayan 9 unit, pasar negeri dan pasar desa 38 unit, gudang 11 unit. Telah diterbitkan sebanyak 1.892 SIUP sedangkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari tahun 1995 sampai dengan 2004 telah diterbitkan sebanyak 1.529 TDP.
- 2) Volume dan nilai ekspor dari tahun 1995 sampai dengan 2004 selalu fluktuatif, pada tahun 1995 volume ekspor sebanyak 5.939.182 dengan nilai US \$ 7.784.716, pada tahun 2000 volume ekspor sebanyak 5.038.1165 dengan nilai US \$ 4.098.798 dan pada tahun 2004 volume ekspor menjadi sebanyak 5.705.108 dengan nilai sebesar US \$ 4.014.948.
- 3) Perkembangan ekspor komoditas unggulan yang rata-rata volumenya tertinggi adalah arang briket mencapai 4.487 ton dengan nilai US \$ 1,16 juta, kedua adalah jamur merang rata-rata volumenya 2.288 ton dengan nilai US \$ 1,73 juta. Sedangkan komoditas lain yang cukup potensi adalah kerajinan agel, gula kristal, anyaman bambu, anyaman pandan, wayang golek, dengan negara tujuan ekspor adalah Jepang, Belanda dan Australia.
- 4) Permasalahan di bidang perdagangan antara lain distribusi produk agroindustri dan kerajinan belum efektif, kemampuan permodalan bagi pedagang masih rendah, belum optimalnya penataan dan pengembangan kawasan perdagangan, rendahnya kemampuan ekspor daerah, rendahnya perlindungan terhadap konsumen dan penguasaan di bidang HAKI dan BDKT, lemahnya informasi pasar baik dalam dan luar negeri, serta promosi dan kemitraan.

g. Pariwisata

- 1) Jenis dan tempat wisata meliputi wisata pantai yaitu Glagah dan Congot di wilayah kecamatan Temon, pantai Bugel di kecamatan Panjatan, pantai Trisik di kecamatan Galur. Wisata pegunungan yaitu puncak Suralaya di kecamatan Samigaluh, gua Kiskendo di Girimulyo. Wisata air yaitu waduk Sermo di kecamatan Kokap,

pemandaan Clereng di kecamatan Pengasih dan wisata religius meliputi makam Girigondo di kecamatan Temon, makam Nyi Ageng Serang dan Sendangsono di kecamatan Kalibawang.

- 2) Potensi obyek wisata cukup beragam tapi belum mempunyai daya tarik wisatawan yang tinggi disebabkan dukungan infrastruktur yang kurang memadai, terbatasnya promosi pariwisata, serta SDM di bidang pariwisata masih rendah baik untuk aparaturnya maupun pelaku wisatanya .

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- a. Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sumber terbentuknya iklim inovasi yang menjadi landasan bagi tumbuhnya kreativitas sumber daya manusia yang pada gilirannya dapat menjadi sumber pertumbuhan dan daya saing ekonomi, selain itu IPTEK menentukan tingkat efektivitas dan efisiensi proses transformasi sumberdaya menjadi sumberdaya baru yang lebih bernilai.
- b. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo bekerja sama dengan perguruan tinggi telah dapat memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna. Adapun hasil rekayasa teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung antara lain penjernihan air, mesin perontok padi, mesin perontok jagung, dsb.
- c. Masyarakat telah melakukan rekayasa teknologi tepat guna dan menghasilkan produk yang diolah dengan teknologi sederhana. Contoh Biogas, Pembuatan VCO, perontok padi.

4. Prasarana dan Sarana

- a. Berdasarkan topografi dan hidrologi, wilayah Kabupaten Kulon Progo dapat dibagi menjadi bagian utara, tengah dan selatan. Bagian utara berupa perbukitan, merupakan kawasan fungsi lindung dan daerah tangkapan air bagi DAS Serang dan sebagian DAS Progo. Di wilayah ini banyak dijumpai mata air yang merupakan sumber air utama bagi masyarakat disamping air hujan. Di bagian tengah merupakan dataran bergelombang sampai berbukit, sumber air utama berasal dari air tanah,

sungai dan hujan. Sedangkan bagian selatan berupa dataran aluvial dan dataran pantai. Sebagian merupakan wilayah yang sering tergenang banjir pada saat musim hujan karena beberapa desa merupakan merupakan daerah cekungan.

- b. Kondisi sarana dan prasarana sumber daya air saat ini masih ditandai oleh rendahnya aksesibilitas, kualitas, ataupun cakupan pelayanan. Akibatnya, sarana dan prasarana yang ada belum sepenuhnya dapat menjadi tulang punggung bagi pembangunan pertanian termasuk dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan.
- c. Pengembangan prasarana penampung air, seperti waduk, reservoir, embung, dan situ, masih perlu ditingkatkan sehingga diharapkan dapat memenuhi penyediaan air untuk berbagai kebutuhan, baik pertanian, rumah tangga, perkotaan, maupun industri terutama pada musim kering yang cenderung makin panjang yang seringkali mengakibatkan terjadinya krisis air.
- d. Wilayah Kabupaten Kulon Progo dilalui oleh tiga sungai besar beserta anak-anak sungainya yaitu Sungai Bogowonto di bagian barat, Sungai Serang di bagian tengah dan Sungai Progo di bagian timur. Jumlah sungai seluruhnya ada 37, jumlah danau dan mata air 9.
- e. Air irigasi mayoritas mengandalkan ketersediaan air di sungai dan prasarana irigasi sebagian besar secara teknis sudah berumur tua sehingga perlu ditingkatkan. Air irigasi utama diambil dari intake Kalibawang dan Intake Sapon yang terletak di Sungai Progo. Waduk Sermo memberikan suplesi air irigasi pada Jaringan Irigasi Kalibawang pada saat debit sungai Progo tidak mencukupi. Luas areal sawah pertanian yang dialiri irigasi dari Bendungan Sermo seluas 3.445 Ha. Jaringan Irigasi Kalibawang juga memberikan suplesi ke Sungai Serang dan bersama dengan Waduk Sermo membentuk Daerah Irigasi Kaibawang yang memiliki luasan 7.152 Ha. Jaringan Irigasi Sapon yang mengambil air irigasi dari Intake Sapon membentuk Daerah Irigasi Sapon yang memiliki luasan 2.150 Ha. Saat ini Jumlah bendungan/ DAM ada 55 unit dengan rincian 3 unit berstatus propinsi dan 52 unit berstatus kabupaten. Jaringan irigasi primer sepanjang 33,07 km, sekunder sepanjang 119,16 km dan tersier 200 km. Panjang saluran irigasi di Kabupaten Kulon Progo secara keseluruhan adalah 356,23 Km.

- f. Lahan sawah di Kabupaten Kulon Progo seluas 10.886 Ha. Luas lahan yang terairi oleh saluran irigasi teknis seluas 7.271 Ha, semi teknis 1.160 Ha, dan daerah irigasi kecil 957 Ha, sawah tadah hujan 1.744 ha
- g. Selain itu, laju pengembangan sarana dan prasarana pengendali banjir juga masih belum mampu mengimbangi laju degradasi lingkungan penyebab banjir sehingga bencana banjir masih menjadi ancaman utamanya bagi Kabupaten Kulon Progo bagian selatan. Sejalan dengan perkembangan ekonomi wilayah, banyak daerah telah mengalami defisit air permukaan, sedangkan di sisi lain konversi lahan pertanian telah mendorong perubahan fungsi prasarana irigasi sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengendalian.
- h. Pada sisi pengembangan lembaga pengelola sumber daya air, makin berkurangnya sumber daya manusia pada institusi pemerintah, masih lemahnya sumber daya manusia pada lembaga pengelola sumber daya air yang ada di masyarakat, sumberdaya finansial dan teknologi telah menimbulkan pola pengelolaan sumber daya air yang kurang efisien. Pada sisi lain, kesadaran dan partisipasi masyarakat, sebagai salah satu prasyarat terjaminnya keberlanjutan pola pengelolaan sumber daya air, masih belum mencapai tingkat yang diharapkan karena masih terbatasnya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki.
- i. Sampai dengan tahun 2004 panjang jalan adalah 1.112,37 km terdiri dari Jalan Negara sepanjang 28,57 km, Jalan Propinsi 159,90 km dan Jalan Kabupaten sepanjang 923,91 km. Berdasarkan jenis permukaan dan kondisinya. Jalan Negara sepanjang 28,57 km diaspal dengan kondisi baik; Jalan Propinsi sepanjang 159,90 km telah diaspal dengan kondisi baik sepanjang 124,10 km (77,61%) sedang 30,80 km (19,26%); rusak 3,0 km (1,88%) rusak berat 2,0 km (1,25%) dan Jalan Kabupaten sepanjang 923,91 km dengan jenis permukaan diaspal 487,83 km (52,8%); kerikil 251,03 km (27,17%); tanah sepanjang 185,05 km (20,03%); dengan kondisi baik sepanjang 372,43 km (40,31%); sedang sepanjang 398,93 km (43,18%); rusak 137,54 km (14,89%) dan kondisi rusak berat 15,0 km (1,62%), sedangkan Jumlah jembatan sebanyak 502 buah terdiri dari jembatan Negara 12 buah kondisi baik; Propinsi 62 buah dengan kondisi baik 30 buah (48,39%), sedang 32 buah

(51,61%); dan Kabupaten 428 buah dengan kondisi baik sejumlah 192 buah (44,86%), sedang 210 buah (49,06%) dan rusak 26 buah (6,07%)

- j. Jaringan jalan belum dapat menjangkau seluruh pelosok Kabupaten Kulon Progo. Selain itu lebar jalan yang ada juga belum memenuhi standar ketentuan lebar jalan untuk pengoperasian angkutan umum. Kondisi geografis daerah kabupaten Kulon Progo sebagian besar merupakan daerah yang dengan kondisi tanah yang labil dan rawan longsor. Hal ini menyebabkan kondisi jalan cepat mengalami kerusakan.
- k. Prasarana perhubungan darat yang ada yaitu Terminal Wates, Sub Terminal Galur, Sentolo, Jagalan, dan Nanggulan serta Stasiun Kereta Api di Wates dan di Sentolo. Pada tahun 2004 bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang masuk di Terminal Wates rata-rata perhari sebanyak 91 bus dengan penumpang sebanyak 5.284 orang sedang bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) rata-rata per hari sebanyak 80 bus dengan penumpang rata-rata sebanyak 2.736 orang. Jumlah kendaraan transportasi dan jenisnya setiap tahunnya mengalami perkembangan. Pada tahun 2000, Bus sebanyak 380; truk sebanyak 29 unit dan tangki 3 unit pada tahun 2004 menjadi 660 bus, 51 truk dan 4 unit tangki.
- l. Permasalahan prasarana perhubungan antara lain kelengkapan jalan, dan sarana angkutan belum menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo. Kondisi geografis daerah Kabupaten Kulon Progo sebagian besar merupakan daerah perbukitan dengan kondisi tanah yang labil dan rawan longsor menyebabkan sistem transportasi tidak berfungsi secara optimal.
- m. Sampai dengan tahun 2005, di Kabupaten Kulon Progo terdapat 99.905 rumah hunian (perumahan dan permukiman) dengan tingkat kepadatan rumah (densitas) sebesar 170,41 rumah/km². Jumlah bangunan yang memiliki IMB (ijin mendirikan bangunan) dan bersertifikat sampai dengan tahun 2006 sebanyak 59.603 rumah, sedangkan yang belum memiliki IMB dan sertifikat sebanyak 40.302 rumah. Persentase rumah yang memiliki IMB dan sertifikat baru sebesar 59,66%. Kondisi geografi dan morfologi Kabupaten Kulon Progo yang banyak bukit rawan terhadap tanah longsor dan banjir masih akan menjadi ancaman bagi keamanan perumahan.

- n. Permukiman penduduk utamanya di daerah perbukitan tersebar secara sporadis dan tidak mengelompok dalam satuan permukiman. Kondisi ini mengakibatkan pelayanan prasarana dasar seperti jalan, air bersih, listrik kurang efisien dan efektif.
- o. Sektor telekomunikasi telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jumlah sambungan telepon pada tahun 2004 sebanyak 2.694 sambungan atau meningkat sebesar 1,93% dibanding tahun 2003 yang berjumlah 2.143 sambungan dengan rincian 2.143 perorangan/perusahaan, 341 instansi pemerintahan/swasta dan 180 telepon umum/ wartel, meski demikian jaringan telekomunikasi belum menjangkau seluruh Kabupaten Kulon Progo.

5. Politik

- a. Partai politik sebagai sarana dalam rangka penyaluran aspirasi masyarakat di bidang kehidupan berdemokrasi yang keberadaannya dilindungi dengan undang-undang. Di Kabupaten Kulon Progo terdapat 24 partai politik (pemilu tahun 2004). Kehidupan berdemokrasi yang disalurkan melalui partai politik dapat berjalan baik dan kondusif.
- b. Tingkat perolehan suara berdasarkan pemilu tahun 2004 cukup merata dan tidak didominasi pada partai tertentu. Dari 24 partai politik yang ada, yang memperoleh kursi di DPRD sebanyak 10 partai.
- c. Kesadaran masyarakat terhadap pemilu tahun 2004 cukup tinggi hal ini dapat dilihat dari jumlah hak pemilih sebesar 314.836 yang tidak memilih 76.632 orang.
- d. Dalam rangka pembinaan politik, pemerintah Kabupaten Kulon Progo berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Keamanan dan Ketertiban.

Kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Kulon Progo, secara umum cukup kondusif, namun demikian masih ditemukan adanya gangguan keamanan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang dapat dikategorikan merupakan ancaman dan hambatan, yang ditandai dengan adanya tindak kriminal, judi, miras, narkoba, penyakit masyarakat lainnya. Data tahun 2004 menunjukkan tindak kriminal 7 kasus, pencurian 21 kasus, kecelakaan 24 kali, bunuh diri 6 kasus, dan penyakit masyarakat lainnya 7

kasus. Keadaan ini masih berlanjut hingga tahun 2005, dengan data yang menunjukkan kejadian kecelakaan 13 kali, pencurian 12 kasus, bunuh diri 2 kasus dan pembunuhan 2 kasus.

- a. Dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kelembagaan-kelembagaan yang ada serta kerjasama dengan aparat.
- b. Permasalahan dalam menjaga keamanan dan ketertiban antara lain kurangnya ketaatan melaksanakan peraturan perundangan dan nilai-nilai (norma) yang berkembang di masyarakat.

7. Hukum dan Aparatur

- a. Capaian keberhasilan bidang hukum dan aparat (pemerintahan) ditandai dengan antara lain regulasi yang baik pada hampir sebagian besar aspek kehidupan yang menjamin kepastian hukum dan keadilan, dipatuhinya hukum oleh semua pihak dan dukungan aparat yang bersih, berwibawa dan bebas KKN. Selanjutnya optimalisasi pelayanan aparat pemerintah kepada masyarakat ditandai dengan peningkatan kualitas layanan aparat pemerintah kepada masyarakat yang semakin cepat, pasti dengan biaya yang terjangkau, dan minimalisasi keluhan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan aparat pemerintah. Sedangkan peningkatan kesejahteraan aparat ditandai dengan berkurangnya aparat yang mencari tambahan penghasilan pada jam kerja, berkurangnya penyalahgunaan wewenang, dan optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya ditandai dengan meningkatnya kemampuan aparat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan sesuai dengan tujuan implementasi otonomi daerah itu sendiri dan adanya kejelasan kewenangan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
- b. Permasalahan bidang hukum dan aparat (pemerintahan) yang cukup mendasar meliputi beberapa hal, yaitu Lemahnya Penegakan hukum yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum oleh masyarakat, kurang tersosialisasinya aturan hukum, belum terkelolanya dokumentasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) hukum serta masih kurangnya produk-produk hukum daerah yang

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belum optimalnya pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat yang disebabkan oleh koordinasi yang belum intensif dan efektif, kurang adanya komitmen yang kuat aparatur pemerintah terhadap peningkatan akuntabilitas publik, belum tertatanya Sistem pengembangan, penempatan dan penilaian kinerja aparatur serta budaya kerja aparatur, kurangnya dukungan kompetensi, profesionalisme dan motivasi kerja aparatur walaupun dengan tingkat pendidikan dan jenjang kepangkatan yang cukup tinggi, dan kurang proporsionalnya distribusi personil baik dari segi jumlah maupun kompetensinya, serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana yang memadai termasuk didalamnya sarana yang berbasis teknologi informasi. Belum memadainya kesejahteraan aparatur yang disebabkan oleh standar penghasilan aparatur yang relatif belum memadai, belum dilakukan penerapan *reward dan punishment*. Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan daerah dalam implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kuantitas dan kualitas SDM sarana dan prasarana. Inkonsistensi kebijakan Pemerintah Pusat pada bidang pertanahan, dan Propinsi pada kebijakan penyerahan P3D serta UU No. 32 Tahun 2004 tidak memberi spesifikasi jenis kewenangan yang bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, sehingga harus mengidentifikasi sendiri dan berakibat terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kewenangan antara Pemerintah Kabupaten dengan Propinsi.

8. Wilayah dan Tata Ruang

- a. Kabupaten Kulon Progo sebagai salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terletak di bagian paling barat DIY. Secara geografis terletak antara $7^{\circ}38'42''$ - $7^{\circ}59'3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}1'37''$ - $110^{\circ}16'26''$ Bujur Timur. Batas-batas Kabupaten Kulon Progo adalah di sebelah timur adalah Sungai Progo menjadi batas dan memisahkan wilayah Kulon Progo dengan Kabupaten Sleman dan Bantul. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo Propinsi Jawa Tengah, sedangkan di sebelah selatan berhadapan dengan Samudra Indonesia.

Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 586,27 km² secara administratif terdiri dari 12 kecamatan, 88 desa dan 930 dusun. Secara fisiografis Kulon Progo terdiri dari dataran pantai di bagian selatan, di bagian tengah dan timur berupa topografi bergelombang sampai berbukit, dan di bagian barat serta utara berupa perbukitan-pegunungan. Rangkaian perbukitan-pegunungan di bagian barat dan utara Kulon Progo ini dikenal sebagai perbukitan Menoreh.

- b. Secara geografis/kewilayahan, Kabupaten Kulon Progo terletak pada jalur transportasi Jawa selatan yang terhubung dengan kota-kota di Jawa oleh jaringan transportasi darat, termasuk jalur kereta api. Jalur selatan Jawa ini memiliki prospek baik untuk berkembang. Prospek ini juga didukung oleh kekayaan sumberdaya wilayah di bidang pertanian, peternakan, perikanan-kelautan, wisata, pertambangan. Wilayah Kabupaten Kulon Progo bagian utara dan barat yang merupakan perbukitan Menoreh dengan pemandangan yang elok menyimpan kekayaan di bidang pertanian, perkebunan dan pariwisata, tetapi disisi lain merupakan kawasan rawan bencana tanah longsor dan sekaligus sebagai kawasan lindung yang harus dikelola agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sementara sebagian wilayah selatan Kabupaten Kulon Progo merupakan kawasan yang rawan terhadap bencana banjir dan sekaligus mempunyai potensi pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata.
- c. Dalam lingkup wilayah DIY berdasarkan rencana tata ruang wilayah Propinsi DIY maka posisi Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut. Berdasarkan nilai strategis kawasan Kabupaten Kulon Progo merupakan kawasan strategis penunjang kegiatan sektor strategis. Pengembangannya diarahkan untuk menampung dan atau mewadahi perkembangan kegiatan industri, perdagangan dan permukiman. Disamping itu sebagian wilayah Kabupaten Kulon Progo merupakan kawasan strategis kritis, dengan arahan kebijakannya adalah mengendalikan dan merehabilitasi penurunan fungsi lindung kawasan tersebut. Berdasarkan fungsi kawasan, fungsi-fungsi budidaya yang dikembangkan di Kabupaten Kulon Progo meliputi kawasan-kawasan pariwisata, pertanian, permukiman, pesisir dan kelautan, perindustrian, pertambangan dan kawasan khusus militer. Sementara dalam pengembangan sistem kota-kota Propinsi DIY, Kota Wates dan Nanggulan diarahkan untuk berperan sebagai pusat pertumbuhan penunjang sektor strategis.

- d. Pada saat ini Kabupaten Kulon Progo telah memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Kulon Progo (Perda Nomor 1 Tahun 2003) sebagai pedoman pengaturan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Sedangkan Rencana rinci sebagai pedoman operasional pemanfaatan dan pengendalian ruang belum mencakup seluruh fungsi kawasan. Sesuai dengan jangka waktu berlakunya, serta memperhatikan dinamika pemanfaatan ruang dan adanya peraturan baru yaitu UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka rencana tata ruang wilayah tersebut pada tahun 2008 perlu ditinjau kembali. Dinamika pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Kulon Progo mengalami peningkatan yang cukup pesat dengan adanya berbagai program pembangunan, baik oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Pembangunan yang dilaksanakan ada yang sudah sesuai dengan rencana tata ruang, tetapi juga ada pembangunan yang belum sesuai dengan rencana tata ruang, serta kecenderungan konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman, perdagangan, dan industri, terutama pada kawasan-kawasan strategis.
- e. Kondisi dan permasalahan dalam pengelolaan penataan ruang di Kabupaten Kulon Progo adalah terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia, belum semua produk rencana tata ruang dapat ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat, masih lemahnya penerapan hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang, adanya konflik kepentingan antar sektor dan plaku pembangunan.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung lingkungan dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kesadaran masyarakat dan kemampuan iptek yang belum memadai sehingga tidak dapat mengimbangi laju pembangunan secara serasi, seimbang dan lestari.
- b. Kondisi sumber daya hutan saat ini dalam hal luasan hutan belum memenuhi standar minimum (15% dari luas wilayah) sedangkan kepemilikan lahan hutan sebagian adalah milik masyarakat melalui pengelolaan hutan rakyat. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau hutan kemasyarakatan (HKm) diperlukan karena relatif

terbatasnya luas hutan negara. Struktur tanah perbukitan di wilayah utara termasuk labil ditambah dengan kondisi tanah perbukitan yang gundul akibat rusaknya vegetasi akan meningkatkan resiko terjadinya bencana tanah longsor yang terjadi hampir setiap tahun, khususnya pada musim penghujan dengan curah hujan yang tinggi, di beberapa wilayah kecamatan di bagian utara yang mempunyai tingkat hunian yang relatif tinggi. Penataan drainase dan pengendalian erosi di wilayah perbukitan sangat diperlukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Sampai dengan saat ini terbukti masih adanya praktek penebangan oleh masyarakat yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan.

- c. Sumber daya kelautan belum dimanfaatkan secara optimal karena beberapa hal, antara lain, (1) belum memadainya prasarana dan sarana meliputi pelabuhan, TPI, alat transportasi air; (2) adanya keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola sumber daya kelautan; dan (3) belum adanya dukungan riset dan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Pemanfaatan yang sudah dilakukan secara intensif antara lain dengan pengelolaan tambak dan tempat pelelangan ikan (TPI).
- d. Pencemaran air, udara, dan tanah masih belum tertangani secara optimal karena aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Pencemaran air di Kabupaten Kulon Progo pada umumnya, adalah adanya indikasi tingginya bakteri *coly*, kandungan kapur, dan Fe. Pada lokasi-lokasi khusus, terindikasi adanya logam berat pada kandungan air minum pada daerah penambangan emas Kokap dan penggunaan pestisida yang kurang terkontrol pada daerah pertanian sangat mengganggu keseimbangan kualitas air tanah di sekitarnya.
- e. Pada musim kemarau panjang mengalami masalah kekeringan. Selain kekurangan air untuk mengairi lahan pertanian, masyarakat pun menghadapi kekurangan suplai kebutuhan air untuk konsumsi dan kebutuhan sanitasi (MCK).
- f. Pencemaran udara mulai terdeteksi yang berasal dari penggilingan padi keliling dan beberapa industri, antara lain yang berkaitan dengan peternakan dan pengolahan batu. Pencemaran tanah terjadi di areal bekas penambangan bahan galian golongan C di beberapa wilayah yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan, terutama pada upaya reklamasi yang sangat jarang dilakukan. Pengambilan bahan galian golongan C juga berlangsung di Daerah Aliran Sungai, yang mempengaruhi

percepatan tingkat kerusakan bangunan-bangunan air. Terjadinya kerusakan lingkungan akibat pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ramah lingkungan pada daerah penambangan emas Kokap dan penambangan pasir pantai selatan. Selain itu pencemaran tanah juga terjadi akibat sebagian masyarakat petani yang menggunakan pupuk dan pestisida anorganik secara berlebihan sehingga merusak kelestarian tanah. Praktek penangkapan ikan dengan menggunakan *stroom* dan racun berpotensi merusak ekosistem air.

- g. Pencemaran terhadap lingkungan juga dapat terjadi karena limbah industri, yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam hal pengolahannya, sehingga juga berperan besar dalam pencemaran air, udara dan tanah. Penataan pengelolaan sampah dan penyediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah perlu memperhatikan timbulnya pencemaran terhadap lingkungan sekitarnya, termasuk juga penanganan sampah medik yang belum dilakukan dengan metode yang tepat dan benar.
- h. Desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah juga telah mengakibatkan meningkatnya konflik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam, baik antar wilayah, antara pusat dan daerah, serta antar penggunaan.

B. TANTANGAN

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama.

a. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan antara lain mengurangi kesenjangan status kesehatan masyarakat, meningkatkan jumlah, kemampuan dan penyebaran tenaga kesehatan di seluruh wilayah kecamatan, meningkatkan akses terhadap fasilitas kesehatan, mengurangi beban ganda penyakit yang diderita sebagian masyarakat yaitu penyakit infeksi menular dan pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular, meningkatkan penanggulangan penyakit menular, disamping itu sebagai daerah endemis malaria penyakit ini harus mendapat perhatian yang serius.

b. Pendidikan

- 1) Tantangan pembangunan bidang pendidikan antara lain adalah menyediakan pelayanan dan pemerataan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan menengah dan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan antar kelompok masyarakat, antar wilayah dan antar jenis kelamin. Disamping itu tantangan pendidikan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, mengurangi kesenjangan mutu antar wilayah, antar jenis kelamin dan meningkatkan akses pendidikan bagi penduduk miskin, sehingga pembangunan pendidikan dapat berperan dalam mendorong pembangunan daerah secara menyeluruh, berakhlak mulia, berjiwa sosial dan meningkatkan daya saing.
- 2) Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan dalam rangka mencapai pendidikan formal, non formal dan informal serta pendidikan standar nasional dan internasional
- 3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelulusan siswa untuk mencapai standar nasional.
- 4) Meningkatkan fasilitasi siswa berprestasi dari tingkat pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi khususnya bagi siswa dari keluarga miskin.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat, dunia usaha dan industri, dan organisasi profesi lainnya, LSM, dalam penyelenggaraan pendidikan non formal.
- 6) Meningkatkan peran keluarga, lembaga-lembaga budaya, dan lembaga pendidikan formal dan non formal.
- 7) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal.

c. Kependudukan.

- 1) Kecenderungan pertumbuhan penduduk menunjukkan peningkatan positif, sejalan dengan itu berbagai parameter kependudukan mengalami perbaikan dengan indikasi pengendalian angka kelahiran, peningkatan Usia Harapan Hidup, penurunan Angka kematian bayi, pengendalian pertumbuhan penduduk yang tumbuh seimbang baik struktur maupun komposisinya.

- 2) Peningkatan mobilitas penduduk yang tinggi memerlukan peningkatan pelayanan dan pendaftaran penduduk yang berbasis teknologi Informasi seperti SIAK *online* dan NIK, serta peningkatan regulasi dan fasilitasi terhadap persebaran dan pemerataan penduduk.

d. Keluarga Berencana (KB).

- 1) Kesadaran masyarakat terutama pasangan usia subur dan akseptasi kaum pria terhadap program Keluarga Berencana yang tinggi memerlukan dukungan ketersediaan beragamnya alat kontrasepsi yang mudah, murah dan aman. Besarnya kesadaran masyarakat ini juga memerlukan peningkatan fasilitasi dan pendampingan petugas lapangan KB yang memadai, terlatih dan handal.
- 2) Tingginya kesadaran masyarakat terhadap akseptasi program KB memerlukan peningkatan internalisasi kesehatan reproduksi dan norma-norma akhlak mulia.
- 3) Perbaikan parameter kependudukan juga berdampak pada tuntutan terhadap peningkatan kualitas keluarga yang diindikasikan oleh peningkatan kesejahteraan keluarga sesuai dengan pencapaian tahapannya.
- 4) Peningkatan pelayanan program KB memerlukan peningkatan fasilitasi, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan.

e. Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

- 1) Peningkatan tuntutan terhadap kualitas bidang ketenagakerjaan memerlukan peningkatan fasilitasi, pelayanan dan pemberdayaan untuk meningkatkan perbaikan parameter ketenagakerjaan yang diindikasikan oleh meningkatnya keterampilan, inovasi dan kreativitas tenaga kerja, serta meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.
- 2) Perbaikan parameter ketenagakerjaan itu juga memerlukan peningkatan peranserta pemangku pembangunan bidang ketenagakerjaan terutama untuk meningkatkan perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan kerja.
- 3) Lapangan usaha sektor informal semakin berkembang sebagai marginalisasi bursa kerja global dengan kompetensi yang tidak menentu (*unskill labour*). Perkembangan ini memerlukan peningkatan fasilitasi bagi terciptanya kemandirian dan daya saing

yang tinggi dengan struktur pekerja yang didominasi oleh tenaga profesional yang melakukan usaha sendiri dan didukung oleh kompetensi lembaga pendidikan dan keterampilan kerja yang memadai.

- 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam rangka penerapan mekanisasi pertanian dengan penggunaan teknologi yang maju
- 5) Peningkatan pelayanan transmigrasi untuk menyediakan tenaga kerja, lapangan dan kesempatan kerja baru, juga untuk memfasilitasi pemerataan dan penyebaran penduduk, serta untuk mendorong pengembangan wilayah perlu meningkatkan fasilitasi, pembinaan dan pemberdayaan calon transmigrasi untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan kemandirian.

f. Kesejahteraan Sosial.

Tantangan pembangunan bidang kesejahteraan sosial antara lain mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas PSKS, mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, mengurangi pengaruh negatif dari era globalisasi, meningkatkan motivasi dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam menangani PMKS, meningkatkan pemberdayaan PMKS, meningkatkan jaminan sosial bagi PMKS tidak potensial, meningkatkan sarana prasarana penanganan PMKS, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak swasta, stakeholder, serta kerjasama antar daerah dalam penanganan PMKS.

g. Kebudayaan.

Tantangan bidang kebudayaan antara lain meningkatkan pembinaan kesenian dan meningkatkan ketersediaan fasilitas dan kualitas sumber daya manusia pembina kesenian tradisional, meningkatkan pembinaan dan pelestarian upacara adat yang disesuaikan dengan semangat dan perkembangan jaman namun tetap menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, meningkatkan apresiasi terhadap kreativitas dan inovasi pengembangan budaya khususnya budaya Jawa, mengintensifkan pembinaan terhadap Himpunan Penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai upaya agar penganutnya dapat meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama masing-masing, serta meningkatkan sarana prasarana pengelolaan dan pelestarian benda-benda cagar budaya dan benda-benda yang bernilai sejarah. Perlunya pelestarian budaya dengan tetap

memperhatikan norma-norma agama, serta antisipasi terhadap pengaruh globalisasi yang berdampak negatif.

h. Agama.

- 1) Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh terhadap nilai, sikap dan perilaku masyarakat maka tantangan dibidang keagamaan adalah meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama sehingga nilai-nilai agama dapat tertanam sebagai landasan moral, spiritual, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Meningkatkan kualitas kerukunan intern umat beragama, antar umat beragama dan antara umat beragama dan pemerintah.

2. Ekonomi.

a. Perekonomian Daerah

- 1) Meningkatkan nilai tambah sektor-sektor pendukung pertumbuhan ekonomi yang meliputi sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restouran, sektor pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.
- 2) Meningkatkan pertumbuhan wilayah strategis dengan mengembangkan produk unggulan serta meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, dunia usaha dan masyarakat.

b. Pertanian.

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi serta pengolahan hasil pertanian yang memiliki daya saing yang tinggi.
- 2) Meningkatkan jaringan informasi pasar, promosi dan tempat penjualan hasil-hasil pertanian .
- 3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana produksi yang berkualitas dengan mudah dan dapat terjangkau oleh masyarakat mulai dari budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran .

- 4) Meningkatkan kualitas SDM petani dan pemberdayaan kelembagaan pertanian.
- 5) Meningkatkan pengembangan produk-produk unggulan pertanian.
- 6) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
- 7) Meningkatkan rehabilitasi dan konservasi lahan pertanian dalam rangka mengurangi menurunnya kualitas dan daya dukung pertanian.
- 8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka mengantisipasi perubahan gejala alam yang tidak bisa dikendalikan dan merupakan daerah banjir, kekeringan dan tanah longsor .
- 9) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka kajian, penelitian dan pengembangan Pertanian.
- 10) Tuntutan terhadap kemudahan, kecepatan dalam memperoleh sarana produksi pertanian mulai dari budidaya, panen dan paska panen dalam rangka meningkatkan nilai tambah produksi pertanian.
- 11) Adanya ketidakstabilan harga produk pertanian pada saat panen.
- 12) Meningkatkan daya saing produk melalui agribisnis dan agroindustri

c. Penanaman Modal.

- 1) Meningkatkan fasilitasi investasi dan promosi daerah yang bersifat strategik.
- 2) Meningkatkan fasilitasi perijinan dengan mudah, cepat dan perlindungan terhadap investasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Meningkatkan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi.
- 4) Terbentuknya kelembagaan yang menangani penanaman modal di daerah.

d. Koperasi dan UKM

- 1) Meningkatkan kemandirian koperasi mandiri dalam organisasi, pengurus dan keuangan.

- 2) Meningkatkan berbagai macam usaha produksi koperasi melalui kemitraan dengan dunia usaha.
- 3) Meningkatkan akses dan meluasnya pangsa pasar produk UKM dan koperasi.
- 4) Meningkatkan akses penggunaan teknologi, kemampuan organisasi dan manajemen serta kemitraan yang mantap dengan dunia usaha.
- 5) Meningkatkan kualitas anggota koperasi sebagai pelaku ekonomi yang berjiwa kewirausahaan.

e. Perindustrian.

- 1) Meningkatkan daya saing produk industri sesuai dengan permintaan pasar, baik jumlah, mutu, dan kontinuitasnya.
- 2) Adanya kebijakan ekonomi makro yang kurang menguntungkan (Bahan Bakar Minyak, Tarif Dasar Listrik, serta bunga perbankan).
- 3) Meningkatkan terpenuhinya bahan baku industri kecil dan kerajinan serta daya saing ekspor.
- 4) Meningkatnya Usaha industri yang saling bersinergi antara ketrampilan dan penguasaan teknologi.
- 5) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ketrampilan dan penguasaan iptek bidang perindustrian .
- 6) Meningkatkan investasi dalam bidang industri.

f. Perdagangan.

- 1) Meningkatkan daya saing produk dalam rangka globalisasi serta era perdagangan bebas meningkat.
- 2) Meningkatnya tumbuh dan berkembangnya Usaha Kecil Menengah.
- 3) Meningkatnya penerapan teknologi yang mendukung aktivitas perdagangan.
- 4) Meningkatnya kapasitas dan kreativitas produsen untuk menghasilkan produk inovatif yang memenuhi selera pasar, manajemen dan negosiasi.

g. Pariwisata.

- 1) Meningkatkan sarana dan prasarana dasar maupun penunjang obyek wisata agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.
- 2) Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat serta koordinasi antar pelaku pariwisata dengan pelaku ekonomi, sosial, budaya terutama yang berhubungan dengan pengembangan SDM, penyediaan fasilitas jasa, sarana dan prasarana serta promosi pariwisata yang didukung dengan perencanaan pengembangan pariwisata yang memadai.
- 3) Terbangunnya pariwisata berkelanjutan berbasis pada masyarakat yang layak secara ekonomi, dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang, dapat diterima secara sosial budaya setempat dan dengan mendayagunakan teknologi yang tepat.
- 4) Terbangunnya keaneragaman obyek wisata dan daya tarik wisata dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata.
- 5) Terjalinnnya kerjasama dan jaringan paket wisata dalam pengembangan pariwisata antar Kabupaten/Kota di Jateng dan DIY yang makin mantap.

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- a. Meningkatkan kemampuan dalam penguasaan dan penerapan iptek baik teknologi terapan maupun tepat guna dan teknologi masa depan serta pemanfaatan hasil-hasil kajian dan penelitian yang telah dilaksanakan.
- b. Meningkatkan kontribusi iptek untuk meningkatkan kemampuan dalam memenuhi hajat hidup masyarakat antara lain menciptakan rasa aman, memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan) dan mengatasi degradasi fungsi lingkungan serta mengatasi dan menanggulangi adanya bencana alam.
- c. Meningkatkan fasilitasi pengembangan iptek, khususnya teknologi tepat guna.

4. Sarana dan Prasarana.

- a. Meningkatkan koordinasi pembangunan dan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (*integrated water resources management*) dengan melaksanakan pemberdayaan petani pemakai air dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, teknis, dan finansial.

- b. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan penyediaan air baku di berbagai sektor kehidupan menghadapi tantangan utama, yaitu meningkatkan pasokan air baku yang ditempuh melalui pengembangan prasarana penampung air yang dapat dikelola bersama oleh masyarakat.
- c. Pengembangan sarana dan prasarana pengendali daya rusak air untuk mengantisipasi perkembangan daerah-daerah permukiman dan pertanian.
- d. Meningkatkan pengelolaan jaringan irigasi yang diselenggarakan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan perkumpulan petani pemakai air sesuai kewenangannya perlu didorong terus menerus dalam upaya mempertahankan kelestarian fungsi irigasi.
- e. Meningkatkan upaya mempertahankan kondisi kualitas air yang ada serta pemulihan terhadap kualitas air yang telah tercemar diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan lingkungan hidup dan penerapan teknologi.
- f. Meningkatkan kemudahan aksesibilitas ke daerah–daerah sentra ekonomi, pertanian, perindustrian maupun daerah wisata dengan membangun jaringan infrastruktur jalan dalam kondisi mantap dan menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Kulon Progo, serta terpadu dan terintegrasi antar moda sehingga sesuai dengan kebijakan Rencana Tata Ruang dan Wilayah.
- g. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, dengan (a) melakukan reformasi secara serentak, khususnya yang berkaitan dengan perpajakan, retribusi/biaya perizinan daerah, pertanahan dan tata ruang, sebagai upaya untuk menekan dan mengurangi harga rumah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; (b) menyempurnakan pola subsidi sektor perumahan yang tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan pasti, khususnya subsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah; (c) mendorong adanya insentif perpajakan kepada dunia usaha agar berpartisipasi secara langsung dalam penyediaan perumahan;
- h. Meningkatkan pembangunan perumahan dan permukiman yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal yang memenuhi standar kelayakan sebagai rumah yang sehat serta semakin merata dan menjangkau bagi yang berpenghasilan rendah.

- i. Meningkatkan pembangunan jaringan listrik, air minum, sarana perekonomian, dan sarana publik.
- j. Meningkatkan pengembangan sistem transportasi yang efisien dan efektif, terjangkau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan yang didukung peningkatan transportasi yang terpadu antarmoda dan intramoda serta selaras dengan pengembangan wilayah, mewujudkan pelayanan transportasi yang mendukung pembangunan ekonomi sosial dan budaya.
- k. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan peraturan yang kondusif, meningkatkan iklim kompetisi yang sehat, meningkatkan peran serta pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat dalam pelayanan transportasi publik, mengembangkan alternatif pembiayaan dan investasi, dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dan teknologi transportasi yang tepat guna, hemat energi, dan ramah lingkungan
- l. Meningkatkan jangkauan prasarana jalan dan sarana angkutan serta jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah untuk menunjang pengembangan wilayah serta terbangunnya simpul-simpul transportasi dan seluruh kelengkapan jalan

5. Politik.

Demi menjaga kondisi yang sudah cukup baik dan kondusif tersebut diperlukan :

- a. Meningkatkan komunikasi antar partai politik, antara partai politik dengan pemerintah.
- b. Meningkatkan fasilitasi terhadap pengembangan demokrasi.
- c. Mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- d. Terjaganya rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

6. Keamanan dan Ketertiban

- a. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban dan penyakit masyarakat.
- b. Meningkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
- c. Meningkatkan antisipasi terhadap gangguan keamanan yang semakin kompleks.

- d. Terkendalinya peredaran minuman beralkohol dan minuman lain yang memabukkan, penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya.

7. Hukum dan Aparatur

Tantangan pembangunan bidang hukum dan aparatur (pemerintahan) antara lain adalah:

- a. Meningkatkan penegakan hukum, sehingga adanya kepastian hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Meningkatkan kesadaran hukum seluruh komponen masyarakat dan dipatuhinya hukum itu sendiri oleh seluruh pihak yang terkait.
- c. Meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat terlayani secara prima, murah, mudah, cepat dan berkualitas.
- d. Meningkatkan kesejahteraan aparatur melalui *reward and punishment*.
- e. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan kewenangan daerah dalam implementasi otonomi daerah yang seluas-luasnya, sehingga daerah dapat menjalankan kewenangannya secara jelas berdasar pada prinsip-prinsip otonomi daerah yang diterapkan secara murni, konsisten dan konsekuen.

8. Wilayah dan Tata Ruang.

- a. Meningkatkan penataan ruang yang baik dengan didukung regulasi dalam bidang tata ruang yang konsisten dan terpadu yang didalamnya meliputi kebijakan yang sesuai, adanya kepastian hukum/legalitas rencana tata ruang, proses perijinan yang terpadu, adanya pengaturan tentang pemberian insentif dan disinsentif dan dengan didukung sumber daya manusia yang unggul.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat yang lebih besar, baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang. Masyarakat mengetahui dan memahami rencana tata ruang sebagai kebijakan bersama yang menjadi acuan dalam pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menciptakan ruang yang nyaman, produktif dan berkelanjutan dan pada akhirnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan perkotaan dan perdesaan secara berencana dan terpadu dengan memperhatikan rencana tata ruang, pertumbuhan penduduk, lingkungan permukiman, lingkungan usaha dan lingkungan kerja serta kegiatan ekonomi dan

sosial agar terwujud lingkungan yang bersih, sehat, indah dan nyaman serta menjaga keserasian dan keselarasan nilai sosial budaya yang mencerminkan kepribadian daerah, tertatanya ruang publik dan sarana prasarananya berdasarkan asas keadilan.

- d. Meningkatkan kualitas tata ruang yang *up to date* yang diproses secara transparan, partisipatif, dan demokratis sesuai dengan kebutuhan.

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

- a. Mengendalikan penurunan daya dukung lingkungan yang di tandai, deforestasi, terganggunya keseimbangan tata air, berkurangnya penutupan lahan di wilayah hulu daerah aliran sungai untuk menjamin kelangsungan kehidupan dan keberhasilan pembangunan.
- b. Memperbanyak infrastruktur energi untuk memudahkan layanan kepada masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap minyak dan meningkatkan kontribusi gas, batubara, serta energi terbarukan seperti biogas, biomassa, energi matahari, arus laut, dan tenaga angin.
- c. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya kelautan untuk perhubungan laut, perikanan, pariwisata, pertambangan, industri maritim, bangunan laut, dan jasa kelautan dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.
- d. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.
- e. Meningkatkan penanganan kasus pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh laju perkembangan pembangunan.
- f. Meningkatkan penyelamatan ekosistem dalam rangka pelestarian lingkungan hidup beserta flora-fauna di dalamnya.
- g. Meningkatkan sistem pemantauan dan pengendalian atas perusakan kawasan lindung, perlindungan hutan, sungai dan pantai, serta hutan hijau kota.

C. MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang meliputi:

1. Kabupaten Kulon Progo dengan luas wilayah 586,27 km² merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang terletak di bagian paling barat. Secara geografis terletak antara 7°38'42" – 7°59'3" Lintang Selatan dan 110°1'37" – 110°16'26" Bujur Timur. Di bagian utara dibatasi oleh Kabupaten Magelang, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Hindia, sebelah barat dibatasi Kabupaten Purworejo, sedangkan di sebelah timur dibatasi Kabupaten Bantul dan Sleman.
2. Kabupaten Kulon Progo memiliki topografi yang bervariasi yaitu dengan ketinggian antara 0 – 1000 meter di atas permukaan air laut terbagi menjadi 3 wilayah meliputi:
 - a. Bagian Utara
Merupakan dataran tinggi/perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 meter dari permukaan air laut, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Girimulyo, Kokap, Kalibawang, Nanggulan dan Samigaluh.
 - b. Bagian Tengah.
Merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian antara 100 – 500 meter dari permukaan air laut, meliputi sebagian Kecamatan Nanggulan, Sentolo, Pengasih, Kalibawang dan Lendah, wilayah dengan lereng antara 2 – 15%, tergolong berombak dan bergelombang merupakan peralihan dataran rendah dan perbukitan.
 - c. Bagian Selatan.
Merupakan dataran rendah dengan ketinggian 0–100 meter dari permukaan air laut, meliputi sebagian Kecamatan Temon, Wates, Panjatan, Galur, Pengasih dan Lendah. Berdasarkan kemiringan lahan, memiliki lereng 0–2%, merupakan wilayah pantai dengan garis pantai sepanjang kurang lebih 24,8 km.
3. Potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Kulon Progo meliputi kekayaan laut dan darat. Disamping itu Kulon Progo juga dilewati tiga sungai besar, yaitu Sungai Progo, Sungai Serang, Sungai Bogowonto, dan Waduk Sermo.

4. Penduduk dan kekayaan budaya merupakan sumber daya potensial dan produktif bagi pembangunan daerah.
5. Keamanan dan ketertiban yang mantap, kondusif, dan dinamis mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2005 – 2025

Berdasarkan kondisi daerah saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dan memperhatikan modal dasar yang dimiliki oleh Kabupaten Kulon Progo, maka VISI Pembangunan Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 adalah :

MASYARAKAT KABUPATEN KULON PROGO YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN

Visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan yang ingin dicapai.

Kemandirian adalah hakekat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya. Dalam rangka mengisi kemerdekaan, Kabupaten Kulon Progo berupaya membangun kemandirian. Kemandirian bukanlah kemandirian dalam keterisolasian. Kemandirian mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan bermasyarakat, lingkup regional, nasional maupun internasional. Kemandirian yang demikian adalah paham yang proaktif dan bukan reaktif atau defensif. Kemandirian merupakan konsep yang dinamis karena mengenali bahwa kehidupan dan kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik konstelasinya, perimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Terlebih lagi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas ketergantungan antar daerah semakin kuat .

Masyarakat Kabupaten Kulon Progo yang mandiri adalah masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Untuk membangun kemandirian, harus dibangun kemajuan ekonomi. Kemampuan untuk berdaya saing menjadi kunci mencapai kemajuan sekaligus kemandirian.

Kemandirian suatu masyarakat tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam daerah yang makin kokoh; dan kemampuan memenuhi sendiri kebutuhan pokok.

Secara mendasar kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap masyarakat atau daerah mengenai dirinya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Karena menyangkut sikap, kemandirian pada dasarnya adalah masalah budaya dalam arti seluas-luasnya. Sikap kemandirian harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan, baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun keamanan dan ketertiban. Dalam pelaksanaan pembangunan, kemandirian masyarakat Kulon Progo tetap menjadi bagian dari Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah.

Tingkat kemajuan Kabupaten Kulon Progo dinilai berdasarkan berbagai ukuran, ditinjau dari indikator sosial dan dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu daerah dikatakan makin maju apabila sumberdaya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduknya, ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu daerah juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan yang erat antara kemajuan suatu daerah dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Daerah yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk

yang lebih kecil, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang semakin baik akan tercermin dalam produktivitas yang semakin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu daerah diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pemerataannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pemerataan ekonomi suatu daerah menjadi daerah tersebut lebih sejahtera dan lebih maju. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang sektor industrinya dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam menciptakan pendapatan maupun dalam penyerapan tenaga kerja. Selain itu dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian dan sektor-sektor jasa; serta pemanfaatan sumber alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktifitas yang tinggi. Daerah yang maju umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk hukum yang mantap. Lembaga politik dan kemasyarakatan telah berfungsi berdasarkan aturan dasar, yaitu perundang-undangan yang ditetapkan. Daerah yang maju juga ditandai dengan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik maupun keamanan dan ketertiban. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi, yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Masyarakat yang maju adalah masyarakat yang hak-hak warganya, keamanannya dan ketentramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut masyarakat yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

Kemandirian dan kemajuan masyarakat Kulon Progo tidak hanya dicerminkan oleh perkembangan ekonomi semata, tetapi mencakup aspek yang lebih luas, yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial.

Pembangunan masyarakat Kulon Progo bukan hanya sebagai masyarakat yang mandiri dan maju, melainkan juga masyarakat yang sejahtera lahir batin. Masyarakat yang sejahtera lahir batin merupakan kristalisasi dari masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual. Sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan sekaligus obyek pembangunan, rakyat mempunyai hak, baik dalam merencanakan melaksanakan, maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu masalah keadilan merupakan ciri yang menonjol dalam pembangunan.

Kesejahteraan lahir dan batin harus tercermin pada semua aspek kehidupan. Semua rakyat mempunyai kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperoleh lapangan pekerjaan, mendapatkan pelayanan sosial, pendidikan dan kesehatan, mengemukakan pendapat; melaksanakan hak-hak politik; menjaga keamanan dan ketertiban; serta mendapatkan perlindungan dan kesamaan di depan hukum, tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun, baik antar individu, gender, maupun wilayah. Masyarakat yang sejahtera lahir dan batin adalah masyarakat yang sudah terpenuhi kebutuhan hidupnya serta dapat memberikan makna dan arti penting bagi masyarakat lainnya.

Dalam mewujudkan visi pembangunan daerah ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan Pancasila** adalah memperkuat jati diri dan

karakter masyarakat melalui pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan intern dan antar umat beragama, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, dan memiliki kebanggaan sebagai masyarakat Kulon Progo.

2. **Mewujudkan masyarakat Kulon Progo berdaya saing** adalah mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek, membangun infrastruktur yang maju; memperkuat perekonomian lokal berbasis keunggulan daerah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan.
3. **Mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi; memperkuat peran masyarakat; memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah; meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil konsekuen, memihak masyarakat dan tidak diskriminatif.
4. **Mewujudkan Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu** adalah membangun kesiapan aparat dan masyarakat dalam penciptaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah.
5. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** adalah meningkatkan pembangunan wilayah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; menyediakan akses yang sama terhadap berbagai pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

6. **Mewujudkan Kulon Progo asri dan lestari** adalah memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi; meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan yang berkesinambungan; memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan; serta meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal pembangunan.
7. **Mewujudkan wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri** adalah meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berkeunggulan; mengelola potensi wilayah untuk kesejahteraan; membangun ekonomi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pantai dan laut secara berkelanjutan.
8. **Mewujudkan Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun nasional** adalah : memantapkan koordinasi dan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pemerintahan, keamanan dan ketertiban dalam pembangunan regional, nasional maupun internasional.

Untuk mewujudkan delapan misi tersebut diperlukan kelembagaan pemerintahan yang kokoh, efektif dan efisien, didukung kualitas aparatur yang profesional dan berjiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*).

BAB IV

ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005-2025

Tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Kulon Progo tahun 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin, pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut.

1. **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab** ditandai oleh hal-hal berikut:
 - a. Terwujudnya karakter masyarakat yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kulon Progo yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi iptek.
 - b. Makin mantapnya budaya daerah yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat masyarakat Kulon Progo, serta menguatnya jati diri dan kepribadiannya.
2. **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang sejahtera lahir dan batin** ditunjukkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan daerah-daerah lain yang maju, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.
 - b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan yang diupayakan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan dan lain-lain, ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

- c. Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di semua wilayah. Sektor pertanian, dalam arti luas dan pariwisata yang didukung oleh sarana dan prasarana yang andal menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global sebagai motor penggerak perekonomian, jasa serta pertambangan yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.
- d. Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.
- e. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan daerah .

3. **Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang demokratis, berlandaskan hukum** ditunjukkan oleh hal-hal berikut:

- a. Terciptanya supremasi hukum dan penegakkan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Terciptanya penegakan hukum tanpa memandang kedudukan, pangkat, dan jabatan seseorang demi supremasi hukum dan terciptanya penghormatan
- b. Menciptakan peraturan perundang-undangan untuk memperkuat kelembagaan demokrasi di Kulon Progo.
- c. Memperkuat peran masyarakat sipil dan partai politik dalam
- d. Memantapkan pelembagaan nilai-nilai demokrasi yang menitikberatkan pada prinsip-prinsip toleransi, non-diskriminasi, dan kemitraan.

- e. Terwujudnya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintah yang berdasarkan hukum, birokrasi yang professional dan netral, masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang
4. **Terwujudnya Kulon Progo yang aman, damai dan bersatu** ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Terwujudnya keamanan dan ketertiban yang menjamin terlaksananya pelaksanaan pembangunan daerah.
 - b. Terwujudnya koordinasi dan kerja sama yang mantap antar elemen pemerintahan dan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
5. **Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan**, ditandai oleh hal-hal berikut:
- a. Tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat; Terwujudnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; kawasan Industri; Agropolitan; Jalur Jalan Lintas Selatan; Pembangunan Pelabuhan penangkapan Ikan Samodra; kemungkinan pembangunan Bandara, Pangkalan Angkatan Laut Nasional, Penambangan pasir besi dan pabrik baja; Meningkatnya aktifitas dan pertumbuhan ekonomi di kota dan pedesaan, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah .
 - b. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman, sehat dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya jaminan pangan sepanjang tahun untuk tingkat rumah tangga.
 - c. Terpenuhi kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukungnya bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang yang berkelanjutan, efisien, dan akuntabel untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
 - d. Sebaran permukiman terdorong dan terkendali secara alami menempati lahan yang aman dari bencana alam dan lebih terkonsentrasi pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan infrastruktur jalan, listrik, air

minum dan pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien.

- e. Terwujudnya lingkungan perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan kehidupan yang baik, berkelanjutan, serta mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

6. Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo asri dan lestari, ditandai hal-hal sebagai berikut :

- a. Terciptanya kondisi perkotaan dan pedesaan yang tertata rapi, indah, sehat dan nyaman .
- b. Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya sesuai dengan fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara seimbang, dan lestari. Kawasan yang berfungsi Lindung diutamakan di kawasan hutan dan sepanjang kawasan bukit Menoreh.
- c. Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing masyarakat, serta modal pembangunan .
- d. Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.

7. Terwujudnya wilayah pantai dan laut Kulon Progo yang maju dan mandiri, ditandai hal-hal sebagai berikut :

- a. Teroptimalkannya potensi pesisir dan sumber kekayaan laut dalam rangka membangun ekonomi, keamanan baik di tingkat regional dan Nasional secara berkelanjutan, didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.
- b. Meningkatnya dan menguatnya sumber daya manusia dibidang kelautan yang didukung oleh pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.
- c. Terkendalinya dampak bencana pesisir dan pencemaran laut.

8. Terwujudnya Kulon Progo berperan penting dalam lingkup regional maupun

nasional, ditandai hal-hal sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Kabupaten Kulon Progo dan mempromosikan identitas daerah sebagai Kabupaten demokratis dalam tatanan masyarakat regional maupun nasional.
- b. Meningkatnya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kerjasama daerah, regional, nasional dan Internasional dalam rangka peningkatan pembangunan daerah.
- c. Terwujudnya kemandirian daerah dalam konstelasi regional, Nasional maupun global.
- d. Meningkatnya investasi perusahaan-perusahaan tingkat nasional maupun Luar Negeri di Kabupaten Kulon Progo.

Untuk mencapai tingkat kemajuan, kemandirian, serta kesejahteraan lahir dan batin yang diinginkan, maka arah pembangunan jangka panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut.

A. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2005-2025

1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, BERMORAL, BERETIKA, BERBUDAYA, DAN BERADAB

Terciptanya kondisi masyarakat Kulon Progo berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya daerah memberikan arah bagi perwujudan daerah yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

- a. Pembangunan agama diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi

kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan. Di samping itu, pembangunan agama diarahkan pula untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis.

- b. Pembangunan dan pematapan jati diri masyarakat Kulon Progo ditujukan untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, modern, dan unggul. Jati diri tersebut merupakan kombinasi antara nilailuhur, seperti religius, kebersamaan dan persatuan, serta nilai modern yang universal yang mencakup etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik. Pembangunan jati diri tersebut dilakukan melalui transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun. Untuk memperkuat jati diri dan kebanggaan daerah, pembangunan olah raga diarahkan pada peningkatan budaya dan prestasi olah raga.
- c. Budaya inovatif yang berorientasi iptek terus dikembangkan agar masyarakat Kulon Progo menguasai iptek serta mampu berjaya pada era persaingan global. Pengembangan budaya iptek tersebut dilakukan dengan meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap iptek melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi iptek dengan mengarahkan masyarakat dari budaya konsumtif menuju budaya produktif. Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual, dan emosional. Pengembangan iptek serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat, dan peradaban manusia.

2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KULON PROGO YANG BERDAYA SAING

Kemampuan masyarakat untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi, akan menjadikan Kulon Progo siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan

mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing masyarakat, pembangunan daerah dalam jangka panjang diarahkan untuk (a) mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (b) memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan; (c) meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan; dan (d) membangun infrastruktur yang maju; serta (e) melakukan reformasi birokrasi, dan kebijakan-kebijakan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan.

a. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

- 1) Pembangunan sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang maju dan mandiri sehingga mampu berdaya saing dalam era globalisasi. Dalam kaitan itu, pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kulon Progo yang antara lain ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan angka reproduksi neto (NRR) sama dengan 1, atau angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1.
- 2) Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, regional dan Nasional, serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.
- 3) Pembangunan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi dalam

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga penting perannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang berharkat, bermartabat, berakhlak mulia, dan menghargai keberagaman sehingga mampu bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan masyarakat dan tanpa diskriminasi. Komitmen pemerintah terhadap pendidikan harus tercermin pada kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

- 4) Pelayanan pendidikan yang mencakup semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Oleh karena itu, perlu disediakan pendidikan dasar yang bermutu dan terjangkau disertai dengan pembebasan biaya pendidikan khususnya dari keluarga miskin, tidak mampu serta berprestasi. Penyediaan pelayanan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi pada masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang beragam yang dilandasi oleh penghormatan pada hak-hak asasi manusia (HAM). Penyediaan pelayanan pendidikan sepanjang hayat sesuai perkembangan iptek perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk termasuk untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan bagi penduduk usia produktif yang jumlahnya semakin besar.
- 5) Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia usia lanjut (manula), dan keluarga miskin.

Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan yang disertai oleh peningkatan pengawasan, pemberdayaan masyarakat, dan manajemen kesehatan. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan iptek, serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerja sama lintas sektor. Penekanan diberikan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat serta upaya promotif dan preventif. Pembangunan daerah harus berwawasan kesehatan, yaitu setiap kebijakan publik selalu memperhatikan dampaknya terhadap kesehatan. Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor yang meliputi produksi pangan, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan tingkat rumah tangga dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya dalam rangka mencapai status gizi yang baik.

- 6) Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan, dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan; penurunan jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak; serta penguatan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak di tingkat daerah, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.
- 7) Pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Di samping itu, pembangunan olahraga diarahkan pada peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat.

b. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global

- 1) Perekonomian dikembangkan dengan memperkuat perekonomian domestik serta

berorientasi dan berdaya saing global. Untuk itu dilakukan transformasi bertahap dari perekonomian berbasis keunggulan komparatif sumber daya alam menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif. Kerjasama antar daerah dilakukan dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan antardaerah yang kokoh. Upaya tersebut dilakukan dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola peningkatan produktivitas daerah melalui inovasi, penguasaan, penelitian, pengembangan dan penerapan iptek menuju ekonomi berbasis pengetahuan serta kemandirian dan ketahanan masyarakat secara berkelanjutan; mengelola kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik secara berkelanjutan, dan mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

- 2) Perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang memperhatikan kepentingan daerah, regional dan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penanggulangan kemiskinan. Pengelolaan kebijakan perekonomian perlu memperhatikan secara cermat dinamika globalisasi, komitmen nasional di berbagai fora perjanjian ekonomi internasional, dan kepentingan nasional dengan mengutamakan kelompok masyarakat yang masih lemah, serta menjaga kemandirian dan kedaulatan ekonomi bangsa.
- 3) Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik di dalam menyusun kerangka regulasi dan perizinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga, mengembangkan, dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat serta melindungi konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi daerah; dan meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai wilayah .
- 4) Peranan pemerintah daerah yang efektif dan optimal diwujudkan sebagai fasilitator, regulator, sekaligus sebagai katalisator pembangunan di berbagai tingkat guna efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, terciptanya lingkungan

usaha yang kondusif dan berdaya saing, dan terjaganya keberlangsungan mekanisme pasar.

- 5) Struktur perekonomian diperkuat dengan menempatkan sektor industri sebagai motor penggerak yang didukung oleh kegiatan pertanian dalam arti luas, pariwisata, kelautan, dan pertambangan yang menghasilkan produk-produk secara efisien, modern, dan berkelanjutan serta jasa-jasa pelayanan yang efektif, yang menerapkan praktik terbaik dan ketatakelolaan yang baik agar terwujud ketahanan ekonomi yang tangguh.
- 6) Pengembangan iptek untuk ekonomi diarahkan pada peningkatan kualitas dan kemanfaatan iptek dalam rangka mendukung daya saing secara global. Hal itu dilakukan melalui peningkatan, penguasaan, dan penerapan iptek secara luas dalam sistem produksi barang/jasa, pembangunan pusat-pusat keunggulan iptek, pengembangan lembaga penelitian yang handal, perwujudan sistem pengakuan terhadap hasil penemuan dan hak atas kekayaan intelektual, pengembangan dan penerapan standar mutu, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM iptek, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana iptek. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan, serta pengembangan kelembagaan sebagai keterkaitan dan fungsional sistem inovasi dalam mendorong pengembangan kegiatan usaha.
- 7) Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Pasar kerja yang fleksibel, hubungan industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua pihak merupakan ciri-ciri pasar kerja yang diinginkan. Selain itu, pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis untuk efektivitas dan efisiensi peningkatan kualitas tenaga kerja sebagai bagian integral dari investasi sumber daya manusia. Sebagian besar pekerja,

termasuk tenaga kerja Kabupaten Kulon Progo yang bekerja di luar negeri, akan dibekali dengan pengakuan kompetensi sesuai dinamika kebutuhan industri dan dinamika persaingan global.

- 8) Investasi diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal daerah, dalam negeri dan asing p bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah; serta meningkatkan kapasitas infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi masyarakat .
- 9) Efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah sektor primer terutama sektor pertanian dalam arti luas, kelautan, dan pertambangan ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar lokal, regional dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. Hal itu merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, dan penguatan ketahanan pangan. Semua itu harus dilaksanakan secara terencana dan cermat untuk menjamin terwujudnya transformasi seluruh elemen perekonomian daerah ke arah lebih maju dan lebih kokoh pada era globalisasi.
- 10) Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah pertanian dalam arti luas dan kelautan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan mengembangkan agribisnis yang dinamis dan efisien, yang melibatkan partisipasi aktif petani dan nelayan. Peningkatan itu diselenggarakan melalui revitalisasi kelembagaan pada tingkat operasional, optimalisasi sumber daya, dan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha agar mampu meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas serta merespon permintaan pasar dan memanfaatkan peluang usaha. Selain bermanfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan pada umumnya, upaya tersebut dapat menciptakan diversifikasi perekonomian perdesaan yang pada gilirannya meningkatkan sumbangan di dalam pertumbuhan perekonomian

Daerah. Perhatian perlu diberikan pada upaya-upaya pengembangan kemampuan masyarakat, pengentasan kemiskinan secara terarah, serta perlindungan terhadap sistem perdagangan dan persaingan yang tidak adil.

- 11) Pembangunan industri diarahkan untuk mewujudkan industri yang berdaya saing, baik di pasar lokal maupun internasional, dan terkait dengan pengembangan industri kecil dan menengah, dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan. Struktur industri dalam hal penguasaan usaha akan disehatkan dengan meniadakan praktik-praktik monopoli dan berbagai distorsi pasar melalui penegakan persaingan usaha yang sehat dan prinsip-prinsip pengelolaan usaha yang baik dan benar. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.
- 12) Dalam rangka memperkuat daya saing perekonomian, sektor industri perlu dibangun guna menciptakan lingkungan usaha mikro (lokal) yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui (1) pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk; (2) penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya; dan (3) penyediaan sarana dan Prasarana investasi yang memadai .
- 13) Pelaksanaan perdagangan luar negeri yang dilakukan Kulon Progo diupayakan lebih menguntungkan dan mendukung perekonomian daerah agar mampu memaksimalkan manfaat sekaligus meminimalkan efek negatif dari proses integrasi dengan dinamika globalisasi. Upaya tersebut diselenggarakan melalui (a) perkuatan posisi daerah di dalam berbagai fora kerja sama perdagangan internasional (skala global, regional, bilateral, dan multilateral) untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar ekspor daerah sekaligus mengamankan kepentingan strategis daerah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran, mengembangkan perdesaan,

dan melindungi aktivitas perekonomian nasional dari persaingan dan praktik perdagangan internasional yang tidak sehat, dan (b) pengembangan citra, standar produk barang dan jasa daerah yang berkualitas internasional,

- 14) Perdagangan daerah diarahkan untuk memperkokoh sistem distribusi daerah, regional dan nasional yang efisien dan efektif yang menjamin kepastian berusaha untuk mewujudkan (a) berkembangnya lembaga perdagangan yang efektif dalam perlindungan konsumen dan persaingan usaha secara sehat, (b) terintegrasinya aktivitas perekonomian daerah, regional dan nasional dan terbangunnya kesadaran penggunaan produksi dalam negeri, (c) meningkatnya perdagangan antar wilayah/daerah, dan (d) terjaminnya ketersediaan bahan pokok dan barang strategis lainnya dengan harga yang terjangkau.
- 15) Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Kabupaten Kulon Progo meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi daerah secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah.
- 16) Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing dengan produk impor, khususnya dalam menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dilakukan melalui peningkatan kompetensi perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi dalam iklim usahayang sehat. Pengembangan UKM secara nyata akan berlangsung terintegrasi dalam modernisasi agribisnis dan agroindustri, termasuk yang mendukung ketahanan pangan, serta perkuatan basis produksi dan daya saing industri melalui pengembangan rumpun industri, percepatan alih teknologi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

17) Pengelolaan keuangan daerah bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Sementara itu, sumber utama daerah yang berasal dari pajak dan lain – lain terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik, baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, maupun mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

c. Penguasaan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

- 1) Pembangunan iptek diarahkan untuk menciptakan dan menguasai ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan dasar maupun terapan, serta mengembangkan ilmu sosial dan humaniora untuk menghasilkan teknologi dan memanfaatkan teknologi hasil penelitian, pengembangan, dan perekayasaan bagi kesejahteraan masyarakat, kemandirian, dan daya saing masyarakat melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas iptek yang senantiasa berpedoman pada nilai agama, nilai budaya, nilai etika, kearifan lokal, serta memperhatikan sumber daya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pembangunan iptek diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi; penyediaan teknologi transportasi, dan teknologi kesehatan; pengembangan teknologi material maju; serta peningkatan jumlah penemuan dan pemanfaatannya dalam sektor produksi. Dukungan tersebut dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia iptek, peningkatan anggaran riset, pengembangan sinergi kebijakan iptek lintas sektor, perumusan agenda riset yang selaras dengan kebutuhan pasar, peningkatan sarana dan prasarana iptek, dan pengembangan mekanisme intermediasi iptek. Dukungan tersebut dimaksudkan untuk penguatan sistem inovasi dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pengetahuan. Di samping itu, diupayakan

peningkatan kerja sama penelitian pemerintah daerah dengan lembaga penelitian dan pengembangan (litbang), perguruan tinggi dan dunia usaha serta penumbuhan industri baru berbasis produk litbang dengan dukungan modal ventura dan bentuk lain.

d. Sarana dan Prasarana yang Memadai dan Maju

- 1) Peran pemerintah akan lebih difokuskan pada perumusan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana, sementara peran swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana akan makin ditingkatkan terutama untuk proyek-proyek yang bersifat komersial. Kerja sama dengan swasta dalam pembangunan sarana dan prasarana diarahkan untuk (a) menyediakan sarana dan prasarana transportasi untuk pelayanan distribusi komoditi perdagangan dan industri serta pergerakan penumpang dan barang; (b) menghilangkan kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan serta efektivitas dan efisiensi tenaga listrik; (c) meningkatkan teledensitas pelayanan telematika masyarakat pengguna jasa; dan (d) memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat tanpa permukiman kumuh.
- 2) Pembangunan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan fungsi air sebagai sumber daya sosial (*social goods*) dan sumber daya ekonomi (*economic goods*) yang seimbang melalui pengelolaan yang terpadu, efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan sehingga dapat menjamin kebutuhan pokok hidup dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan diwujudkan melalui pendekatan pengelolaan kebutuhan (*demand management*) yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan, pengonsumsi air, dan pendekatan pengelolaan pasokan (*supply management*) yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air. Pengelolaan prasarana sumber daya air diarahkan untuk mewujudkan peningkatan keandalan layanan melalui kemitraan dengan dunia usaha tanpa membebani masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, dan memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Selain itu, pola hubungan hulu-hilir akan terus dikembangkan agar pola pengelolaan yang lebih berkeadilan dapat tercapai. Pengembangan dan

penerapan sistem pemanfaatan terpadu (*conjunctive use*) antara air permukaan dan air tanah akan digalakkan terutama untuk menciptakan sinergi dan menjaga keberlanjutan ketersediaan air tanah. Pengendalian daya rusak air mengutamakan pendekatan nonkonstruksi melalui konservasi sumber daya air dan keterpaduan pengelolaan daerah aliran sungai. Peningkatan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan terus diupayakan tidak hanya pada saat bencana, tetapi juga pada tahap pencegahan serta pemulihan pasca bencana.

- 3) Pembangunan transportasi diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar wilayah; membentuk dan memperkuat kesatuan dan persatuan serta memantapkan keamanan dan ketertiban serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan. Untuk itu, pembangunan transportasi dilaksanakan dengan mengembangkan jaringan pelayanan secara antarmoda dan intramoda; menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi yang memberikan kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif; mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan; meningkatkan iklim kompetisi secara sehat agar dapat meningkatkan efisiensi dan memberikan alternatif bagi pengguna jasa dengan tetap mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator terhadap pelayanan umum yang terjangkau kepada masyarakat; menyediakan pelayanan angkutan umum massal yang didukung pelayanan pengumpan, yang aman, nyaman, tertib, terjangkau dan ramah lingkungan serta bersinergi dengan kebijakan tata guna lahan; serta meningkatkan budaya berlalu lintas yang tertib dan disiplin. Untuk mendukung daya saing dan efisiensi angkutan penumpang dan barang diarahkan pada perwujudan kebijakan yang menyatukan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks pelayanan; mempercepat dan memperlancar pergerakan penumpang dan barang dari kota ke desa atau sebaliknya melalui perbaikan manajemen transportasi antarmoda dan

intramoda; meningkatkan pembangunan jalan bebas hambatan pada koridor-koridor strategis.

- 4) Pembangunan telematika diarahkan untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge-based society*) melalui penciptaan landasan kompetisi jangka panjang penyelenggaraan telematika dalam lingkungan multioperator; pengantisipasi implikasi dari konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, dan penyiaran, baik mengenai kelembagaan maupun peraturan termasuk yang terkait dengan isu keamanan, kerahasiaan, privasi, dan integritas informasi; penerapan hak kekayaan intelektual; pengoptimalan pembangunan dan pemanfaatan prasarana telematika dan prasarana nontelekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika; penerapan konsep teknologi netral yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; peningkatan sinergi dan integrasi prasarana jaringan menuju *next generation network*; peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi pemanfaatan telematika serta pemanfaatan dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi; pengembangan industri dalam negeri; dan industri konten sebagai upaya penciptaan nilai tambah dari informasi.
- 5) Pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana energi untuk meningkatkan akses dan pelayanan konsumen terhadap energi melalui (1) pengembangan kemampuan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara memadai dan dapat memiliki kehandalan yang tinggi melalui pembangkit baru (angin, matahari, air); (2) pengembangan daya guna iptek yang melibatkan dunia usaha, pendidikan, pemerintah, dan masyarakat secara terintegrasi dan bersifat strategis berbasis transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) termasuk pengembangan standarisasi produk .
- 6) Pembangunan dan penyediaan air minum dan sanitasi diarahkan untuk mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan sektor-sektor terkait lainnya, seperti industri, perdagangan, transportasi,

pariwisata, dan jasa sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan melalui pendekatan tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*) dan pendekatan terpadu dengan sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya air, serta kesehatan.

e. **Reformasi Hukum dan Birokrasi**

- 1) Pembangunan hukum diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.
- 2) Pembangunan aparaturnya dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya daerah dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan.

3. MEWUJUDKAN MASYARAKAT KULON PROGO YANG DEMOKRATIS BERLANDASKAN HUKUM

Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan, dan memaksimalkan potensi masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya

aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, agama, maupun gender. Hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal.

Untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang demokratis berdasarkan hukum dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan partisipatoris yang bersifat *bottom up* bisa berjalan; menumbuhkan masyarakat tanggap (*responsive community*) yang akan mendorong semangat sukarela (*spirit of voluntarism*) yang sejalan dengan makna gotong royong; memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah; menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengkomunikasikan kepentingan masyarakat; meningkatkan budaya hukum dan menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.

- a. Pelaksanaan struktur politik yang dititikberatkan pada proses pelembagaan demokrasi dilakukan dengan (a) mempromosikan dan mensosialisasikan pentingnya keberadaan aturan hukum yang kuat dan memiliki kredibilitas tinggi sebagai pedoman dasar bagi sebuah proses demokratisasi berkelanjutan; (b) menata hubungan antara kelembagaan politik dan kelembagaan Pemerintahan; (c) meningkatkan kinerja lembaga-lembaga penyelenggara pemerintahan dalam menjalankan kewenangan dan fungsi-fungsi yang diberikan oleh konstitusi dan peraturan perundangan; (d) mendukung pelaksanaan desentralisasi dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah; dan (e) mewujudkan pelembagaan demokrasi yang berkelanjutan.
- b. Penataan peran pemerintah dan masyarakat dititikberatkan pada pembentukan kemandirian dan kedewasaan masyarakat. Kemandirian masyarakat dilakukan untuk memperkuat kemandirian bidang ekonomi dan pendidikan. Di samping itu, penataan peran pemerintah dan masyarakat diarahkan pada penataan fungsi-fungsi yang positif dari pranata-pranata kemasyarakatan, dan partai politik untuk membangun kemandirian masyarakat dalam mengelola

berbagai potensi konflik sosial yang dapat merusak serta memberdayakan berbagai potensi positif masyarakat bagi pembangunan. Upaya untuk mendorong perwujudan masyarakat sipil yang kuat perlu juga memperhatikan pengaruh pasar dalam kehidupan sosial politik agar tidak terjadi ekses-ekses negatif dan kesenjangan sosial yang merugikan kehidupan masyarakat.

- c. Penataan proses politik yang dititikberatkan pada pengalokasian/representasi kekuasaan diwujudkan dengan (a) meningkatkan secara terus menerus kualitas proses dan mekanisme seleksi publik yang lebih terbuka bagi para pejabat politik dan publik serta (b) mewujudkan komitmen politik yang tegas terhadap pentingnya kebebasan media massa dan keleluasaan berserikat, berkumpul, dan berpendapat setiap warga berdasarkan aspirasi politiknya masing-masing.
- d. Pengembangan budaya politik yang dititikberatkan pada penanaman nilai-nilai demokratis diupayakan melalui (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis, terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan, anti kekerasan, serta nilai-nilai toleransi, melalui berbagai wacana dan media serta (b) upaya mewujudkan berbagai wacana dialog bagi peningkatan kesadaran mengenai pentingnya memelihara persatuan bangsa.
- e. Peningkatan peranan komunikasi dan informasi yang ditekankan pada pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dilakukan dengan (a) mewujudkan kebebasan pers yang lebih mapan, terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan pemerintahan secara cerdas dan demokratis; (b) mewujudkan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong munculnya media-media massa daerah yang independen; (c) mewujudkan regulasi dalam bidang penyiaran sehingga dapat lebih menjamin pemerataan informasi secara luas dan mencegah monopoli informasi; (d) menciptakan jaringan informasi yang bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat luas; (e) menciptakan jaringan teknologi informasi dan komunikasi yang mampu

menghubungkan seluruh *link* informasi yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo sebagai suatu kesatuan yang mampu mengikat rasa kesatuan dan persatuan; (f) memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif agar mampu memberikan informasi yang lebih komprehensif kepada masyarakat supaya tidak terjadi kesalahpahaman serta (g) meningkatkan peran lembaga independen di bidang komunikasi dan informasi untuk lebih mendukung proses pencerdasan masyarakat dalam kehidupan politik dan perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan.

- f. Pembangunan hukum diarahkan pada makin terwujudnya peraturan perundang-undangan daerah yang lebih mantap mencakup materi perundang-undangan daerah, struktur perundang-undangan daerah; perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran dan budaya hukum yang tinggi dalam rangka mewujudkan penegakan hukum; serta penciptaan kehidupan masyarakat yang adil dan demokratis. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan perundang-undangan daerah dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban, dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang makin tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pembangunan daerah akan makin lancar.
- g. Pembangunan materi perundang-undangan daerah diarahkan untuk melanjutkan pembaharuan produk perundang-undangan daerah untuk menggantikan peraturan perundang-undangan daerah yang tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Kulon Progo serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan melibatkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah. Di sisi lain, perundang-undangan daerah yang baru juga harus mampu mengisi kekurangan/kekosongan hukum sebagai pengarah dinamika lingkungan strategis yang sangat cepat berubah.

- h. Penerapan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM) dilaksanakan secara tegas, lugas, profesional, dan tidak diskriminatif dengan tetap berdasarkan pada penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM), keadilan, dan kebenaran, terutama dalam penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang transparan dan terbuka dalam rangka mewujudkan tertib sosial dan disiplin sosial sehingga dapat mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas daerah yang mantap dan dinamis. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM) dilakukan terhadap berbagai tindak pidana, terutama yang akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat luas, antara lain tindak pidana korupsi, kerusakan lingkungan, dan penyalahgunaan narkotik dan zat adiktif lainnya. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi terus ditingkatkan dengan lebih memberikan akses terhadap segala informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan akses kepada masyarakat terhadap pelibatan dalam berbagai proses pengambilan keputusan pelaksanaan pembangunan daerah sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat. Akibatnya, akan terbentuk perilaku warga masyarakat Kulon Progo yang mempunyai rasa memiliki dan taat hukum. Peningkatan perwujudan masyarakat yang mempunyai kesadaran hukum yang tinggi harus didukung oleh pelayanan dan bantuan hukum dengan biaya yang terjangkau, proses yang tidak berbelit, dan penetapan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.
- i. Penuntasan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan aparatur pemerintah dicapai dengan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat, lini pemerintahan, dan semua kegiatan; pemberian sanksi yang seberat-beratnya kepada pelaku penyalahgunaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; peningkatan intensitas dan efektivitas pengawasan aparatur pemerintah melalui pengawasan internal, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat; serta peningkatan etika birokrasi dan budaya kerja serta pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara pemerintahan terhadap prinsip-prinsip ketatapemerintahan

yang baik.

4. MEWUJUDKAN KULON PROGO YANG AMAN, DAMAI DAN BERSATU

Gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horisontal akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan, ketertiban dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang.

- a. Keamanan daerah diwujudkan melalui keterpaduan pembangunan keamanan dan ketertiban, dan pembangunan keamanan sosial yang diselenggarakan berdasarkan kondisi geografi, demografi, sosial, dan budaya .
- b. Sistem dan strategi menciptakan keamanan dan ketertiban secara terus menerus disempurnakan untuk mendukung terciptanya sistem keamanan dan ketertiban yang melibatkan seluruh komponen masyarakat berdasarkan kapabilitas aparaturnya agar secara simultan mampu mengatasi ancaman kejahatan dan tindakan yang meresahkan.
- c. Pembangunan keamanan dan ketertiban diarahkan untuk meningkatkan profesionalisme aparaturnya beserta institusi terkait dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

5. MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG LEBIH MERATA DAN BERKEADILAN

- a. Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di berbagai wilayah akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin.
- b. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan laut, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan. Tujuan

utama pengembangan wilayah adalah peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta pemerataannya. Pelaksanaan pengembangan wilayah tersebut dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor, bidang dan selaras dengan perencanaan tingkat Propinsi dan Nasional. Rencana pembangunan dijabarkan dan disinkronisasikan ke dalam rencana tata ruang yang konsisten, baik materi maupun jangka waktunya.

- c. Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata rantai proses industri dan distribusi. Upaya itu dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerja sama antar sektor, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.
- d. Keberpihakan pemerintah daerah ditingkatkan untuk mengembangkan wilayah-wilayah strategis, sehingga wilayah tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat dan dapat mengurangi ketertinggalan pembangunannya dengan wilayah lain. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat secara langsung dan skema pemberian dana bergulir/penguatan modal.
- e. Peningkatan peran dan fungsi perkotaan agar tidak hanya berfungsi sebagai kota tempat tinggal (*dormitory town*) saja, tetapi juga menjadi kota mandiri; (2) pengembangan kegiatan ekonomi kota yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, dan industri telematika serta peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan; dan (3) perevitalan kawasan kota yang meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui pembangunan kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik.
- f. Percepatan pembangunan kota-kota kecamatan ditingkatkan sehingga

diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya. Pendekatan pembangunan yang perlu dilakukan, antara lain, memenuhi kebutuhan pelayanan dasar perkotaan sesuai dengan tipologi kota masing-masing.

- g. Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.
- h. Pembangunan perdesaan didorong melalui pengembangan agroindustri padat pekerja, terutama bagi kawasan yang berbasis pertanian dan kelautan; peningkatan kapasitas sumber daya manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan dan kota-kota kecamatan terdekat dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan; peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi; pengembangan *social capital* dan *human capital* yang belum tergali potensinya sehingga kawasan perdesaan tidak semata-mata mengandalkan sumber daya alam saja; intervensi harga dan kebijakan perdagangan yang berpihak ke produk pertanian, terutama terhadap harga dan upah.
- i. Rencana tata ruang digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap sektor, lintas sektor, maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun secara hierarki. Dalam rangka mengoptimalkan penataan ruang perlu ditingkatkan (a) kompetensi sumber daya manusia dan kelembagaan di bidang penataan ruang, (b) kualitas rencana tata ruang, dan (c)

efektivitas penerapan dan penegakan hukum dalam perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian pemanfaatan ruang.

- j. Menerapkan sistem pengelolaan pertanahan yang efisien, efektif, serta melaksanakan penegakan hukum terhadap hak atas tanah dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan demokrasi. Selain itu, perlu dilakukan penyempurnaan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui pelaksanaan berbagai aturan dan perundang-undangan tentang pertanahan serta penciptaan insentif/disinsentif perpajakan yang sesuai dengan luas, lokasi, dan penggunaan tanah agar masyarakat golongan ekonomi lemah dapat lebih mudah mendapatkan hak atas tanah, serta percepatan penertiban administrasi pertanahan atas hak milik.
- k. Kapasitas pemerintah daerah dikembangkan melalui peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kapasitas keuangan pemerintah daerah, serta kapasitas lembaga legislatif daerah. Selain itu, pemberdayaan masyarakat akan terus dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan; peningkatan akses pada modal usaha dan sumber daya alam; pemberian kesempatan luas untuk menyampaikan aspirasi terhadap kebijakan dan peraturan yang menyangkut kehidupan mereka; serta peningkatan kesempatan dan kemampuan untuk mengelola usaha ekonomi produktif yang mendatangkan kemakmuran dan mengatasi kemiskinan.
- l. Peningkatan kerja sama dengan daerah lain ditingkatkan dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif maupun kompetitif Kulon Progo; menghilangkan ego daerah yang berlebihan; serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerja sama dengan daerah lain melalui sistem jejaring antar daerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana berbagi pengalaman, berbagi keuntungan dari kerja sama, maupun berbagi tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana maupun dalam pembangunan lainnya.
- m. Sistem ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan kemandirian

pangan daerah dengan mengembangkan kemampuan produksi daerah yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

- n. Koperasi yang didorong berkembang luas sesuai kebutuhan menjadi wahana yang efektif untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi kolektif para anggotanya, baik produsen maupun konsumen di berbagai sektor kegiatan ekonomi sehingga menjadi gerakan ekonomi yang berperan nyata dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan usaha mikro menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas usaha dan ketrampilan pengelolaan usaha serta sekaligus mendorong adanya kepastian, perlindungan, dan pembinaan usaha.
- o. Dalam rangka pembangunan berkeadilan, pembangunan kesejahteraan sosial juga dilakukan dengan memberi perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin, fakir, usia lanjut, penderita cacat, terlantar) dan masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal serta wilayah rawan bencana.
- p. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung (miskin, fakir, usia lanjut, penderita cacat, terlantar) disempurnakan melalui penguatan lembaga jaminan sosial yang didukung oleh peraturan-peraturan perundangan, pendanaan, serta sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pemberian jaminan sosial dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya dan kelembagaan yang sudah berakar di masyarakat.
- q. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah disempurnakan

bersama Sistem Perlindungan Sosial Nasional (SPSN) yang didukung oleh peraturan perundang-undangan, pendanaan serta Sistem Nomor Induk Kependudukan (NIK) dapat memberikan perlindungan penuh kepada masyarakat luas secara bertahap sehingga Pengembangan SPSN dan SJSN dilaksanakan dengan memperhatikan budaya dan sistem yang sudah berakar di kalangan masyarakat Kulon Progo.

- r. Pemenuhan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya diarahkan pada (1) penyelenggaraan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, memadai, layak, dan terjangkau oleh daya beli masyarakat serta didukung oleh prasarana dan sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri, dan efisien; (2) penyelenggaraan pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang mandiri mampu membangkitkan potensi pembiayaan yang berasal dari masyarakat dan pasar modal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pemerataan dan penyebaran pembangunan; dan (3) pembangunan perumahan beserta prasarana dan sarana pendukungnya yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup.
- s. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang berupa air minum dan sanitasi diarahkan pada (a) peningkatan kualitas pengelolaan aset (*asset management*) dalam penyediaan air minum dan sanitasi; (b) pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi masyarakat; (c) penyelenggaraan pelayanan air minum dan sanitasi yang kredibel dan profesional; dan (d) penyediaan sumber-sumber pembiayaan murah dalam pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin.
- t. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi. Kebijakan penanggulangan kemiskinan juga diarahkan pada komitmen pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin.

6. MEWUJUDKAN KULON PROGO ASRI DAN LESTARI

Sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Kondisi lingkungan yang tertata rapi, indah, sehat, memberikan suasana nyaman bagi masyarakat dan menarik bagi wisatawan. Sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas masyarakat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan.

a. Penataan kawasan perkotaan dan perdesaan

Kawasan perkotaan didorong untuk terwujudnya kawasan yang nyaman dan asri didukung dengan ketersediaan kebutuhan fasilitas dasar perkotaan, penataan fasilitas pelayanan publik dan peningkatan kualitas lingkungan. Kawasan perdesaan didorong untuk terwujudnya kawasan yang nyaman dan asri dengan tetap memperhatikan kondisi alamiahnya dan didukung ketersediaan prasarana dasar penunjang kegiatan produksi perdesaan dan kualitas lingkungan yang baik dan indah.

b. Penataan bangunan dan lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan dilaksanakan untuk mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang nyaman, aman dan asri serta berkelanjutan dengan tetap memperhatikan daya dukung terhadap aktivitas masyarakat, memperhatikan nilai-nilai lokal seperti arsitektur tradisional dan bahan-bahan lokal.

c. Mendayagunakan Sumber Daya Alam yang Terbarukan.

Sumber daya alam terbarukan, baik di darat dan di laut, harus dikelola dan dimanfaatkan secara rasional, optimal, efisien, dan bertanggung jawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara seimbang. Pengelolaan

sumber daya alam terbarukan yang sudah berada dalam kondisi kritis diarahkan pada upaya untuk merehabilitasi dan memulihkan daya dukungnya yang selanjutnya diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan sehingga tidak semakin merusak dan menghilangkan kemampuannya sebagai modal bagi pembangunan yang berkelanjutan. Hasil atau pendapatan yang berasal dari pemanfaatan sumber daya alam terbarukan diinvestasikan kembali guna menumbuhkembangkan upaya pemulihan, rehabilitasi, dan pencadangan untuk kepentingan generasi sekarang maupun generasi mendatang. Di samping itu, pemanfaatan sumber daya alam yang terbarukan akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi.

d. Mengelola Sumber Daya Alam yang Tidak Terbarukan.

Pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan, seperti bahan tambang dan mineral diarahkan untuk tidak dikonsumsi secara langsung, melainkan diperlakukan sebagai masukan untuk proses produksi yang dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal bagi daerah. Selain itu, sumber daya alam tak terbarukan pemanfaatannya harus seefisien mungkin dan menerapkan strategi memperbesar cadangan dan diarahkan untuk mendukung proses produksi. Hasil atau pendapatan yang diperoleh dari kelompok sumber daya alam tersebut diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dengan diinvestasikan pada sektor-sektor lain yang produktif, juga untuk upaya reklamasi, konservasi, dan memperkuat pendanaan dalam pencarian sumber-sumber energi alternatif, seperti energi yang memanfaatkan seperti biomassa, biogas, mikrohidro, energi matahari, arus laut, tenaga angin yang ramah lingkungan. Pengembangan sumber-sumber energi alternatif itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Di samping itu, pengembangan energi juga mempertimbangkan harga energi yang memperhitungkan biaya produksi, menginternalisasikan biaya lingkungan, serta mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pembangunan energi terus diarahkan kepada keragaman energi dan konservasi energi dengan memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengembangan energi juga dilaksanakan

dengan memperhatikan komposisi penggunaan energi (diversifikasi) yang optimal bagi setiap jenis energi.

e. Menjaga dan Melestarikan Sumber Daya Air.

Pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan menjaga kelestarian fungsi daerah tangkapan air dan keberadaan air tanah; mewujudkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan melalui pendekatan *demand management* yang ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dan konsumsi air dan pendekatan *supply management* yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan keandalan pasokan air; serta memperkuat kelembagaan sumber daya air untuk meningkatkan keterpaduan dan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

f. Mengembangkan Potensi Sumber Daya laut.

Arah pembangunan ke depan perlu memperhatikan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, pendekatan keterpaduan dalam kebijakan dan perencanaan menjadi prasyarat utama dalam menjamin keberlanjutan proses ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selain itu, kebijakan dan pengelolaan pembangunan laut harus merupakan keterpaduan antara sektor lautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan daerah sehingga potensi sumber daya darat dan laut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

g. Memperhatikan dan Mengelola Keragaman Jenis Sumber Daya Alam yang ada pada setiap wilayah.

Kebijakan pengembangan sumber daya alam yang khas dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan wilayah strategis dan cepat tumbuh, serta memperkuat kapasitas dan komitmen daerah untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan partisipasi masyarakat akan pentingnya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan pemerintah daerah antara lain melalui pemberdayaan terhadap berbagai institusi sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Pengelolaan sumber daya alam tetap mengedepankan aspek keberlanjutan bagi generasi mendatang. Untuk itu,

diperlukan tata ruang wilayah yang mantap disertai penegakan agar menjadi pedoman pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan lestari.

h. Mitigasi Bencana Alam Sesuai dengan Kondisi Geologi Kulon Progo.

Secara geografis Kulon Progo berada di wilayah rawan bencana. Kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan memberikan ruang untuk mengembangkan kemampuan dan penerapan sistem deteksi dini serta sosialisasi dan diseminasi informasi secara dini terhadap ancaman kerawanan bencana alam kepada masyarakat. Untuk itu, perlu ditingkatkan identifikasi dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana agar dapat diantisipasi secara dini. Hal itu dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan memberikan perlindungan terhadap manusia dan harta benda karena adanya perencanaan wilayah yang peduli/peka terhadap bencana alam.

i. Mengendalikan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang baik perlu penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pemanfaatan jasa lingkungan yang ramah lingkungan sehingga tidak mempercepat terjadinya degradasi dan pencemaran lingkungan. Pemulihan dan rehabilitasi kondisi lingkungan hidup diprioritaskan pada upaya peningkatan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

j. Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu didukung oleh peningkatan kelembagaan pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup; penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas serta sistem politik yang kredibel dalam mengendalikan konflik; peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas; perluasan penerapan etika lingkungan. Selanjutnya, cara pandang terhadap lingkungan hidup yang berwawasan etika lingkungan perlu didorong melalui

internalisasi ke dalam kegiatan produksi dan konsumsi, dengan cara menanamkan nilai dan etika lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk proses pembelajaran sosial, serta pendidikan formal pada semua tingkatan.

k. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat untuk Mencintai Lingkungan Hidup.

Kebijakan itu diarahkan terutama bagi generasi muda sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan peduli terhadap isu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Dengan demikian, pada masa yang akan datang mereka mampu berperan sebagai penggerak bagi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

7. MEWUJUDKAN WILAYAH PANTAI DAN LAUT KULON PROGO YANG MAJU DAN MANDIRI

Pembangunan wilayah pantai dan pengelolaan kelautan diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya pantai/pesisir berbasis ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, keamanan, dan teknologi.

- a. Membangkitkan wawasan dan budaya bahari, antara lain, melalui (a) pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang kelautan yang dapat diwujudkan melalui semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan; (b) melestarikan nilai-nilai budaya serta wawasan bahari serta merevitalisasi kearifan lokal di bidang kelautan;
- b. Meningkatkan dan menguatkan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan yang diwujudkan, antara lain, dengan (a) mendorong jasa pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang kelautan untuk bidang-bidang keunggulan yang diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan (b) mengembangkan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang kelautan. Selain itu, perlu juga dilakukan peningkatan dan penguatan peranan ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan pengembangan sistem informasi kelautan.

- c. Mengembangkan industri kelautan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan yang meliputi (a) perhubungan laut; (b) industri maritim; (c) perikanan; (d) wisata bahari; (e) energi dan sumber daya mineral; (f) bangunan laut; dan (g) jasa kelautan.
- d. Mengurangi dampak bencana pesisir dan pencemaran laut dilakukan melalui (a) pengembangan sistem mitigasi bencana; (b) pengembangan *early warning system*; (c) pengembangan perencanaan daerah tanggap darurat tumpahan minyak di laut; (d) pengendalian dampak aktivitas di laut.
- e. Meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di kawasan pesisir dilakukan dengan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif skala kecil yang mampu memberikan lapangan kerja lebih luas kepada keluarga miskin.

8. MEWUJUDKAN KULON PROGO BERPERAN PENTING DALAM LINGKUP REGIONAL MAUPUN NASIONAL

Kabupaten Kulon Progo secara geografis berada pada posisi strategis, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta memiliki sumberdaya alam darat dan laut yang potensial, memiliki peluang dan potensi mempengaruhi dan membentuk opini regional maupun nasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan daerah. Dalam rangka mewujudkan Kulon Progo maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin, sangat penting untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan daerah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional.

- a. Kerja sama antar daerah pada tingkat regional, nasional dan Internasional terus ditingkatkan dengan penekanan pada proses pemberdayaan posisi kabupaten sebagai daerah yang memiliki potensi dan keunggulan untuk dapat dikembangkan dan menguntungkan bagi kepentingan daerah, termasuk peningkatan kapasitas aparatur dan keterlibatan masyarakat. Kerjasama luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan diplomasi dan hubungan luar negeri Indonesia dengan memaknai secara positif berbagai peluang yang menguntungkan bagi kepentingan daerah yang muncul dari perspektif baru dalam hubungan internasional yang dinamis.

- b. Peningkatan efektivitas dan perluasan fungsi jaringan kerja sama yang ada demi membangun daerah di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan keamanan menuju terbentuknya kerja sama daerah yang
- c. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban melalui upaya peningkatan saling pengertian politik dan budaya, baik antar daerah maupun antar masyarakat serta peningkatan kerja sama antar daerah dalam membangun tatanan hubungan dan kerja sama ekonomi yang lebih
- d. Penguatan jaringan hubungan dan kerja sama yang produktif antar tokoh-tokoh yang berperan di tingkat daerah, nasional maupun

B. TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS

Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan, tanpa mengabaikan permasalahan lainnya. Oleh karena itu, tekanan skala prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi semua itu harus berkesinambungan dari periode ke periode berikutnya dalam rangka mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.

Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Prioritas masing-masing misi dapat diperas kembali menjadi prioritas utama. Prioritas utama menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan. Atas dasar tersebut, tahapan dan skala prioritas utama dapat disusun sebagai berikut.

1. RPJM ke-1 (2005 - 2009)

Berlandaskan pelaksanaan dan pencapaian pembangunan tahap sebelumnya, RPJM I diarahkan untuk membangun di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Kabupaten Kulon Progo yang aman dan damai, sejahtera lahir dan batin.

Kulon Progo yang aman dan damai ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya keamanan dan ketertiban, melalui tertanganinya permasalahan keamanan dan ketertiban yang merupakan landasan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga Kulon Progo berperan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah regional maupun nasional. Kondisi itu didukung oleh berkembangnya nilai baru yang positif dan produktif pada setiap aspek kehidupan.

Kulon Progo yang sejahtera lahir batin dan demokratis ditandai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Kulon Progo; menurunnya angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; berkurangnya kesenjangan antarwilayah, termasuk meningkatnya pengelolaan sumber daya pesisir dan laut; meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia di bidang kelautan yang didukung oleh pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan mutu lingkungan hidup. Kondisi itu dicapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif, termasuk membaiknya infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur lebih didorong melalui peningkatan peran swasta dengan meletakkan dasar-dasar kebijakan dan regulasi serta reformasi dan restrukturisasi kelembagaan, terutama untuk bidang pertanian, pariwisata, transportasi, kelistrikan, dan telematika. Bersamaan dengan itu dilaksanakan rintisan kawasan Industri, kawasan agropolitan, kawasan pariwisata, pembangunan Jalan jalur Lintas Selatan, pembangunan pelabuhan penangkapan Ikan dan Samudra, Bandar Udara, tambang pasir besi dan pabrik Baja serta penempatan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal).

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain, ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang diarahkan untuk membangun bangsa yang berkarakter

cerdas, adil dan beradab, berkepribadian nasional, tangguh, kompetitif, bermoral, dan berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kulon Progo yang beragama, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan; meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak; dan mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

Dengan meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum untuk memperkuat kelembagaan demokrasi; meningkatnya kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan; terciptanya landasan bagi upaya penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bersamaan dengan itu, pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan daerah; serta tertatanya kelembagaan birokrasi dalam mendukung percepatan terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

Bersamaan dengan hal tersebut ditingkatkan mitigasi bencana alam sesuai dengan kondisi geologi Kulon Progo. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup dan menyadari keadaan wilayah yang rawan bencana sehingga makin peduli dan antisipatif. Hal itu didukung oleh pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas di setiap tingkatan pemerintahan dalam rangka penanggulangan bencana serta diacunya rencana tata ruang sebagai payung kebijakan spasial semua sektor dalam rangka mencegah dampak kerusakan lingkungan hidup dan meminimalkan dampak bencana.

2. RPJM ke-2 (2010-2014)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1, RPJM ke-2 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Kulon Progo yang aman dan damai terus membaik ditandai dengan meningkatnya rasa aman dan damai serta terjaganya keamanan dan ketertiban, melalui tertanganinya permasalahan keamanan dan ketertiban yang merupakan landasan bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan, sehingga Kulon Progo berperan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah regional maupun nasional.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia. Sejalan dengan itu, kehidupan masyarakat yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan masyarakat. Posisi penting Kulon Progo sebagai masyarakat demokrasi makin meningkat, dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel makin meningkat yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah.

Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh

kembang optimal, kesejahteraan, dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter masyarakat.

Bersamaan dengan itu dilaksanakan pembangunan kawasan industri, kawasan agropolitan, kawasan pariwisata, pembangunan Jalan jalur Lintas Selatan, pembangunan pelabuhan penangkapan Ikan dan Samudra, tambang pasir besi dan pabrik Baja serta penempatan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), Penyelesaian rintisan Bandar Udara.

Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur pertanian, pariwisata, perdagangan, transportasi, kelistrikan, dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing daerah, serta modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi itu didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

3. RPJM ke-3 (2015 – 2019)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Kulon Progo, kehidupan demokrasi makin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan makin mantapnya kelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kulon Progo dalam berbagai kerja sama antar daerah, regional, nasional, dan internasional. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur pemerintah daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat Kulon Progo terus membaik, meningkat sebanding dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah lain yang berpenghasilan menengah, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus

membalik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayanan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Kulon Progo.

Daya saing perekonomian Kulon Progo semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi dan industri serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; terselenggaranya pelayanan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Kulon Progo; terwujudnya infrastruktur pariwisata; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selain

itu, pengembangan infrastruktur perdesaan akan terus dikembangkan, terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota dan desa tanpa permukiman kumuh.

Bersamaan dengan itu dilaksanakan peningkatan pembangunan kawasan industri, kawasan agropolitan, kawasan pariwisata, pembangunan Jalan jalur Lintas Selatan, pembangunan pelabuhan penangkapan Ikan dan Samudra, tambang pasir besi dan pembangunan pabrik Baja serta pembangunan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), pembangunan Bandar Udara, dan diikuti dengan pengembangan investasi dan infrastruktur yang lain.

4. RPJM ke-4 (2020 – 2024)

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-3, RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kulon Progo yang mandiri, maju, sejahtera lahir dan batin melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas, berakhlak mulia dan berdaya saing.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat. Sejalan dengan kondisi aman dan damai yang makin mantap di seluruh wilayah Kulon Progo, kehidupan demokrasi makin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan

menitikberatkan pada prinsip toleransi, non diskriminasi dan kemitraan dan semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Kulon Progo dalam berbagai kerja sama antar daerah, regional, nasional, dan internasional. Bersamaan dengan itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang dan stabilitas daerah makin mantap serta profesionalisme aparatur pemerintah daerah makin mampu mendukung pembangunan.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat dengan jangkauan lembaga jaminan sosial yang lebih menyeluruh; mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya akses, tingkat kualitas, dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan; meningkatnya kemampuan Iptek; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya tumbuh kembang optimal, kesejahteraan dan perlindungan anak; dan terwujudnya kesetaraan gender; bertahannya kondisi dan penduduk tumbuh seimbang. Sejalan dengan tingkat kemajuan bangsa, sumber daya manusia Kulon Progo diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Kulon Progo yang beragama, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi Iptek. Kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat makin mantap dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan sehingga masyarakat mampu berperan sebagai penggerak bagi konsep pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh ditandai dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antara industri, pertanian, pariwisata, kelautan dan sumber daya alam, dan sektor jasa. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, serta berfungsi dengan baik. Kondisi itu didukung oleh keterkaitan

antara pelayanan pendidikan, dan kemampuan Iptek yang makin maju sehingga mendorong perekonomian yang efisien dan produktivitas yang tinggi; serta makin mantapnya usaha dan investasi di Kulon Progo setara dengan daerah lain yang maju. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan per kapita pada tahun 2025 mencapai kesejahteraan setara dengan daerah-daerah yang berpendapatan tinggi dengan tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin yang makin rendah. Kondisi maju, mandiri dan sejahtera lahir batin makin mantap dengan terselenggaranya jaringan transportasi dan telematika yang andal bagi masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah Kulon Progo; tercapainya elektrifikasi perdesaan dan elektrifikasi rumah tangga; serta terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat yang didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel sehingga terwujud kota dan desa tanpa permukiman kumuh.

Dalam rangka memantapkan pembangunan yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam terus dipelihara dan dimanfaatkan untuk terus mempertahankan nilai tambah dan daya saing masyarakat serta meningkatkan modal pembangunan daerah pada masa yang akan datang.

5. TAHUN 2025

Digunakan sebagai masa penyelesaian atas perencanaan pembangunan sebelumnya, evaluasi berdasarkan pelaksanaan pencapaian perencanaan tahun sebelumnya dan sebagai masa persiapan keberlanjutan RPJMD ke-4 atau RPJPD tahap berikutnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengatur lain mengenai hal dimaksud, maka dilakukan penyesuaian.

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kulon Progo Tahun 2005–2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan daerah merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah 20 tahun ke depan.

RPJP Daerah ini juga menjadi acuan dan menjadi pedoman bagi calon Bupati dan calon Wakil Bupati dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi **Kulon Progo yang maju, mandiri, sejahtera lahir dan batin** perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan daerah yang kuat dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan pemerintah daerah; (3) kebijakan yang berpihak kepada rakyat; dan (4) peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Wates, 18 Juli 2007

BUPATI KULON PROGO,

H. TOYO SANTOSO DIPO